

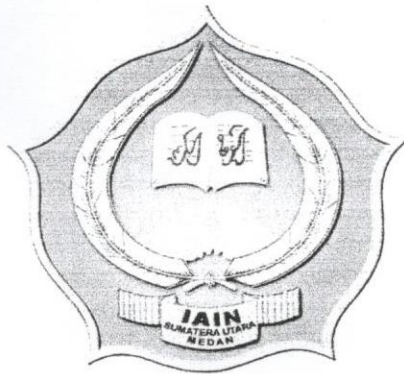
Laporan Penelitian :

**MOTIF PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM:
Studi Terhadap Perkara tahun 2008**

Oleh :

Nama : P a g a r

NIP. 19581231 198803 1 016



**LEMBAGA PENELITIAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2009

Laporan Penelitian :

MOTIF PERCERAIAN

DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM:

Studi Terhadap Perkara tahun 2008

Oleh :

Nama : P a g a r

NIP. 150234518

LEMBAGA PENELITIAN

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2009

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PENELITIAN

- 1.a. Judul Penelitian : Motif Perceraian di Pengadilan Agama
Lubuk Pakam : Studi Terhadap Perkara
tahun 2008
- b. Macam Penelitian: Penelitian Terapan
- c. Bidang Ilmu : Fikih – Hukum Islam
- c. Kategori : Individual
2. Peneliti : Prof.DR.Pagar, M.Ag.
3. Lokasi Penelitian: Pengadilan Agama Lubuk Pakam
4. Jangka Waktu : Juli s.d. Oktober 2009
5. Biaya Penelitian : Rp 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah)

Medan, 30 Oktober 2009

Mengetahui

Ketua Lembaga Penelitian



Prof.DR.H. Abbas Pulungan
NIP 19510505 197803 1 001

Peneliti,

Prof. DR.Pagar, M.Ag.
NIP 19581231 198803 1 016

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul; "MOTIF PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM : Studi Terhadap Perkara tahun 2008".

Berangkat dari data tentang tingginya perceraian di kalangan umat Islam Indonesia, termasuk daerah wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dirasa ada hal yang riskan terutama; 1. Konsep Islam tentang seyogianya perceraian tidak dilakukan kecuali dalam hal yang sangat mendesak, karena hal itu adalah perbuatan halal yang paling dimurkai Allah, 2. Ada stikma non muslim terhadap Islam bahwa banyak perceraian dalam Islam telah membawa nama Islam ternoda, karena telah merusak hubungan suami isteri, dan bisa saja telah merendahkan wanita, 3. Aturan hukum di Indonesia demikian ketat terhadap perceraian ini, tetapi dalam kenyataan masih saja dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian penelitian ini terasa sangat penting.

Lewat judul ini tersimpan rumusan masalah Berapa banyak perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2008 ?, dan Apa saja hal yang menjadi motivasi perceraian itu. ?, dan dengan tujuan penelitian; Untuk mengetahui berapa banyak perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2008 yang lalu, dan apa saja yang menjadi motivasinya.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dan dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpulan data; wawancara, yaitu mewawancarai berbagai pihak terkait, dan juga studi dokumen terhadap buku kegiatan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Putusan para hakim, dan yang lainnya. Semua ini dilakukan dengan menggunakan metode phenomenology dengan pendekatan sosiologis. Sementara metode pengolahan dan analisis datanya dengan menggunakan Case study metotd (Metode studi kasus). Selanjutnya untuk lebih mantapnya penelitian ini maka secara langsung dilakukan penelitian terhadap

dua perkara perceraian. Terakhir bahwa bentuk penelitian ini ditetapkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian membuktikan bahwa ada angka perceraian yang cukup tinggi di PA Lubuk Pakam pada tahun 2008. Ada 721 perkara perceraian yang masuk. Dari jumlah itu telah diselesaikan dan dikabulkan sebanyak 639 perkara, ditolak 6 perkara, digugurkan 27 perkara, dicoret 5 perkara, dan dicabut/ damai sebanyak 44 perkara. Dari jumlah perkara yang dikabulkan tersebut (639 perkara), terdiri dari; cerai talak sebanyak 179 perkara, dan sisanya sebanyak 460 perkara sebagai Cerai gugat.

Dari keseluruhan perkara perceraian tersebut maka ada 4 (empat) motif perceraian, yaitu;

1. Tidak ada tanggung jawab sebanyak 420 perkara (64,62 %) sekaligus sebagai penyebab terbesar.
2. Tidak ada keharmonisan sebanyak 100 Perkara (14,64 %), dan ini sebagai penyebab perceraian kedua terbesar.
3. Ekonomi sebanyak 79 perkara (11,36 %), hal ini sekaligus menjadi penyebab perceraian terkecil kedua setelah motif gangguan pihak ketiga.
4. Gangguan pihak ketiga sebanyak 60 perkara (9,38 %), sekaligus sebagai perkara perceraian dengan motivasi terkecil.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Ungkapan syukur alhamdulillah dipersembahkan ke hadirat Allah Swt. yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatNya kepada kita dengan tiada terhingga, termasuk terselesaikannya penelitian ini. Shalawat dan salam diiringkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw. yang senantiasa setia menyampaikan kebenaran dalam rangka kesematan umat sekalian alam.

Buku kecil dan sederhana ini adalah berupa laporan penelitian Lembaga Penelitian IAIN Sumatera Utara Medan yang berjudul; "MOTIF PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM : Studi Terhadap Perkara tahun 2008".

Alhamdulillah, meskipun dengan banyak kendala dan kesulitan akhirnya laporan penelitian ini telah terselesaikan. Mulai dari kesulitan data yang dibutuhkan, aspek finansial yang sangat terbatas, penyediaan waktu dan pemikiran di tengah kesibukan peneliti sendiri, namun berkat kerja keras dan bersahaja, bantuan berbagai pihak, serta ridha Allah Swt. laporan ini, dengan berbagai keterbatasan, dan kesederhanaannya pun telah selesai dan diluncurkan juga.

Penelitian sejenis studi ke-Islaman seperti ini sangat terasa urgensifnya dalam kehidupan masyarakat, terutama dewasa ini. Di tengah semakin majunya ilmu pengetahuan, cepatnya dinamika masyarakat, bahkan bergesernya nilai-nilai kesadaran masyarakat, maka aspek yang turut mengalami dampaknya adalah berkenaan dengan kerukunan rumah tangga. Masih tingginya angka perceraian

sekarang ini, terasa sangat penting untuk mengetahui penyebabnya, dan pada akhirnya bisa dicarikan solusinya. Dengan hal ini pembinaan keluarga sakinah itu diharapkan akan dapat berlangsung dengan baik.

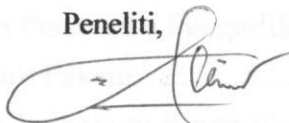
Peneliti menyadari benar bahwa terselesaikannya penelitian ini banyak ditentukan oleh partisipasi berbagai pihak, mulai dari; Rektor IAIN Sumatera Utara, bapak Prof.DR.N.A. Fadhil Lubis, MA., Bapak Ketua Lembaga Penelitian IAIN SU., Prof.DR.H.Abbas Pulungan, Pustakawan IAIN dan PPs IAIN SU, para Dosen dan Pegawai, serta pihak lain yang tidak mungkindisampaikan dalam tulisan singkat ini satu persatu. Mereka adalah pihak yang sangat berjasa dalam penelitian ini, dan kepada mereka diucapkan terima kasih banyak, semoga Allah Swt. memberikan balasan kabajikan yang berlipat ganda, amin.

Lewat laporan penelitian ini, mungkin peneliti belum mampu menyajikan yang terbaik sesuai harapan berbagai pihak. Peneliti sadar tentang kesederhanaan penelitian ini, mudah-mudahan dengan kapasitas yang ada ini pun dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak, demikian juga kepada peneliti sendiri. Atas bebbagai kelemahan dan keterbatasan Peneliti aturkan banyak terima kasih.

Kepada segenap kalangan, Peneliti membuka diri untuk menerima saran dan kritikan dalam rangka perbaikan penelitian ini ke depan, dan atas segala perhatian diucapkan banyak terima kasih.

Medan, 30 Oktober 2009

Peneliti,



Prof. DR. Pagar, M.Ag.

DAFTAR ISI

	Hlm.
HALAMAN JUDUL,	ii
PENGESAHAN,	iii
ABSTRAKSI,	iv
KATA PENGANTAR,	vi
DAFTAR ISI,	viii
 BAB I : PENDAHULUAN,	 1
A. Latar Belakang Masalah,	1
B. Masalah dan Rumusan Masalah,	5
C. Tujuan Penelitian,	5
D. Manfaat Penelitian,	6
E. Pembatasan Istilah,	6
F. Kajian Teoritis,	7
G. Langkah-langkah Penelitian,	11
H. Sistematika Pembahasan,	14
 BAB II : PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM, ..	 16
A. Kewenangan Mengadili,	16
B. Struktur dan Personalia Pengadilan Agama Lubuk Pakam,	21
C. Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam,	25

BAB III : PERCERAIAN DI INDONESIA,	29
--	----

A. Pengertian Perceraian,	29
---------------------------------	----

B. Alasan Perceraian,	34
-----------------------------	----

C. Proses Perceraian,	40
-----------------------------	----

BAB IV : MOTIVASI PERCERAIAN DI PA LUBUK	
--	--

PAKAM PADA TAHUN 2008,	62
------------------------------	----

B. Jumlah Perceraian,	62
-----------------------------	----

C. Motivasi Perceraian,	68
-------------------------------	----

D. Contoh Motif Perceraian,	71
-----------------------------------	----

BAB V : PENUTUP,	81
------------------------	----

A. Kesimpulan,	81
----------------------	----

B. Saran-saran,	82
-----------------------	----

DAFTAR BACAAN,	84
----------------------	----

LAMPIRAN,	87
-----------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara mencolok perkara yang masuk ke Pengadilan Agama dari masa ke masa ternyata dinominasi oleh kasus perceraian.¹ Misalnya saja untuk kondisi tahun 2008, ada 86,97 % (721) perkara perceraian dari 829 perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Lubuk Pakan, berarti hanya ada 13,03 % (108) perkara lainnya, padahal untuk perkara lainnya itu memiliki 12 (dua puluh tujuh) formasi lagi. Bila 108 perkara lainnya itu dirata-ratakan per 12 formasi yang ada maka setiap formasi perkara menjadi 9 (Sembilan) perkara. Hasilnya adalah perkara perceraian berjumlah 721 berbanding perkara lainnya rata-rata 9 perkara. Tentu hal ini adalah suatu kalkulasi fantastik yang cukup mencolok tentang betapa besarnya angka perceraian di kota Lubuk Pakam.² Hal ini dapat dilihat seperti terlihat pada tabel berikut.

¹ Hasil wawancara dengan Wakil Ketua PTA Sumatera Utara Medan Drs. H. Arso, SH., M.A. di Medan pada tanggal 15 Maret 2009.

² *Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tahun 2008*, hlm. 10

TABEL PERSENTASE MOTIF PERCERAIAN

DI PA LUBUK PAKAM TAHUN 2008³

N O	JENIS PERKARA	JUMLAH	PERSEN
1	Cerai gugat	517	62,37 %
2	Cerai Talak	204	24,61 %
3	Kewarisan	9	1,09 %
4	Isbat Nikah	64	7,72 %
5	Pembatalan Nikah	4	0,48 %
6	Izin Poligami	2	0,24 %
7	Perwalian	4	0,48 %
8	Harta Bersama	7	0,84 %
9	Penet. Ahli Waris	10	1,21 %
10	Hadhōnah	4	0,48 %
11	Pengangkatan Anak	3	0,36 %
12	Hibah	-	-
13	Wakaf	-	-
14	Wali Adhal	1	0,12 %
JUMLAH		829	100,00 %

Meski demikian mengejutkan data perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut, tapi yang terpenting untuk diperbincangkan bukanlah perceraian itu

³ *Ibid.*, hlm. 11

semata, melainkan berkenaan dengan motivasi perceraian itu dilakukan oleh yang bersangkutan. Konkritnya hal ini berkenaan dengan latarbelakang (alasan) perceraian itu sendiri adalah menjadi hal yang paling utama untuk didiskusikan. Perceraian itu sendiri adalah ibarat puncak gunung salju yang sesungguhnya menyimpan berbagai persoalan di dalamnya, maka terbangunnya gunung salju itu sesungguhnya adalah menjadi hal penentu dari apa yang ada pada perut gunung salju itu sendiri, maka untuk mengetahui puncaknya, haruslah terlebih dahulu mengamati apa yang ada di dalamnya.

Secara sosiologis, ada banyak logika yang bisa dikembangkan tentang aspek-aspek yang dapat mengurangi keutuhan perkawinan dewasa ini. Di antaranya adalah factor ekonomi, narkoba, penyakit menular misalnya HIV/AID, moral, politik, sampai kepada masalah kebosanan. Yang pasti semua ini adalah hal sangat layak untuk dipertanyakan, dianalisis dan pada akhirnya dihubungkan kepada aspek perceraian itu. Hal seperti ini akan sangat berguna dalam rangka menentukan langkah-langkah selanjutnya.

Dengan pengelompokan alasan perkara perceraian yang dibuat oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut, terlihat bahwa data perceraian yang ada pada tahun 2008 bahwa motif tidak adanya tanggung-jawab suami isteri dalam perkawinan adalah hal yang menjadi aspek paling dominan

bagi mereka untuk tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangga lagi.

Hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

1. Tidak ada tanggung jawab	420 perkara
2. Tidak ada keharmonisan	100 perkara
3. Gangguan pihak lain	60 perkara
4. Ekonomi	79 perkara
	<hr/>
	639 perkara ⁴

Tidak adanya tanggung jawab seperti ditulis pada motif perceraian di atas adalah menjadi sesuatu hal yang masih sangat penting untuk dikembangkan, dianalisis dan dipelajari sehingga diketahui benar tentang apa makna dari hal itu. Apakah hal itu sesuatu yang mandiri berupa perilaku sepihak, atau berupa reaksi terhadap sejumlah nama perilaku yang telah terlebih dahulu ada dalam keluarga itu sendiri. Hal ini penting untuk diketahui tentang keberadaan motif-motif sesungguhnya dari perceraian itu.

Mengingat bahwa perceraian ini adalah momok karatan umat Islam dalam pandangan non muslim, Barat, dan pihak pihak tertentu lainnya, bahkan potensi perceraian ini adalah sangat mengancam kualitas dan kesinambungan regenerasi sebagai potensi bangsa maka untuk mengetahui

⁴ *Ibid.*, hlm.14

apa motif sesungguhnya dari perceraian di kota Lubuk Pakam ini pada tahun 2008 menjadi sangat penting dan mendesak untuk dibahas.

B. Masalah dan Rumusan Masalah

Sesungguhnya penelitian ini ingin mengetahui focus masalah tentang apa sesungguhnya yang menjadi motif perceraian di kota Lubuk Pakam. Lewat hal ini akan dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Berapa banyak perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2008 ?
2. Apa saja motivasi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2008 tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Secara singkat tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui berapa banyak perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2008 yang lalu
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi motivasi perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Paling tidak, penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak tertentu sebagai berikut;

1. Bagi pasangan suami isteri untuk bisa mengantisipasi motivasi perceraian tersebut sehingga tidak melanda rumah tangga mereka dalam rangka mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka sendiri.
2. Bagi pihak Badan Pdenasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) untuk bisa mempersiapkan materi nasehat perkawinan yang relevan dengan peristiwa motivasi perceraian yang terjadi sehingga hal itu bisa diantisipasi.
3. Bagi pihak pemerintah, untuk bisa menjadi bahan rujukan dalam mempersiapkan kebijakan publik yang lebih berorientasi kepada menekan angka perceraian di Indonesia
4. Bagi pihak Yudikatif, untuk bisa menyesuaikan Perda, bahkan peraturan perundang-undangan dalam rangka mengambil kebijakan lebih lanjut.
5. Dan lain-lain.

E. Pembatasan Istilah

Sesuai judul penelitian ini “Motif Perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam: Studi Terhadap Perkara Tahun 2008” maka peneliti mempertegas bahwa dalam rangka

tuntas dan detailnya penelitian ini, peneliti berencana hanya membatasi diri pada merekonstruksi dua perkara perceraian saja dengan motif yang berbeda antara satu sama lainnya, yaitu; 1). Tidak ada tanggung jawab, dan 2). Tidak ada keharmonisan. Hal ini dilakukan tentu setelah terlebih dahulu memberikan gambaran motif perceraian di Pengadilan Agama secara umum pada rentang waktu penelitian dimaksud.

F. Kajian Teoritis

Menurut pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 perkawinan didefinisikan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

M. Yahya Harahap mengatakan; Barang siapa yang memperhatikan perkawinan ini, barangkali dia tidak akan menjumpai pengertian perkawinan yang demikian tinggi falsafahnya dalam negara moderen sekarang ini. Ikatan lahir dan batin itu menjadi dasar utama perkawinan yang di atasnya dibangun pilar-pilar lainnya, sehingga penjelasannya dapat diformulasi sebagai berikut;

⁵Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 1995 M.), hlm. 33.

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri.
- b. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin, dan tujuan kebahagiaan yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan yang Mahaesa.

Sungguh sangat ideal sekali tujuan perakawinan yang diinginkan oleh Undang-Undang ini, dia tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahiriah saja, tetapi sekaligus ikatan pertautan batin suami isteri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia.

Pencantuman kata "batin" di sini membuat perkawinan yang hendak dicapai itu cukup muluk, di samping adanya ikatan lahir, juga mesti dibarengi dengan pertautan hati yang dalam dari calon mempelai. Berhubung ini berkenaan dengan kejiwaan maka sifatnya abstrak, sedang suatu yang abstrak tidak diketahui dengan pasti, dan tidak dapat diukur kecuali hanya sekedar gejala dan aplikasinya saja, maka sangat sulit untuk mengetahuinya secara pasti apakah benar telah tercipta ikatan batin tersebut.⁶

⁶Berbeda halnya dengan apa yang ada di negara lain, di antaranya ada yang membuat pengertian perkawinan itu dalam aspek ikatan lahiriyah semata, misalnya dalam Hukum Barat Amerika mengatakan; *Marriage is a form of contract* (perkawinan adalah suatu bentuk dari kontrak), sedang yang mereka maksud dengan kontrak di sini adalah calon suami, calon isteri, dan negara., Acthur P. Crabtree, *You and the Law*, (New York : Halt Rinehart and Wiston Inc., t.t.), hlm. 139.

Suatu kalimat yang sangat penting artinya di sana adalah "untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal". Kata bahagia itu berkenaan dengan nilai, karenanya memiliki sifat yang relatif, dan ini tertuju kepada subjek (pelaku) perkawinan itu sendiri, maka mungkin saja muncul pertanyaan tentang kebahagiaan macam apa yang diinginkan tujuan perkawinan tersebut. Kemudian dapat ditambahkan lagi bahwa dalam perkawinan yang akan dilangsungkan itu sudah terlihat prospek akan bahagia dan kekal, karenanya muncul pemikiran bahwa bila telah terlihat gambaran yang jelas tentang (terprediksi) bahwa rumah tangga yang akan dibina itu tidak bahagia, dan sifatnya sementara karena akan berakhir dengan perceraian maka tidak boleh dilangsungkan.

Sejalan dengan ini Kompilasi hukum Islam mengemukakan dalam pasal 2-nya bahwa; Perkawinan menurut agama Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon ghaliidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Menurut Jalaluddin sebagai akad yang terkandung di dalamnya pembolehan senggama dengan lafaz nikah atau kawin maka dianya (nikah) adalah *milik al-intifa`* bukan *milik*

⁷Departemen Agama RI., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirbinbapera Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI., 1992/1993), hlm. 6.

al-manfaat, hakikat nikah adalah akad, sedang wati adalah majaz.⁸

Semua ini memperlihatkan bahwa perkawinan itu adalah :

1. Harus dibangun di atas prinsip kekekalan, karenanya tidak ada prediksi akan cerai
2. Harus dibangun di atas kebahagiaan, jadi tidak boleh di atas prospek pertengkar dan ketidakrukunan
3. Dianya adalah akat yang sangat kuat, jadi tidak mudah ambruk
4. Ikatan lahir dan batin, jadi dia tidak akan kering dengan kegersangan yang menggerogotinya
5. Dianya adalah ibadah, jadi dia menjadi sacral, berpahala mengerjakannya, dan berdosa membubarkannya.
6. Dan lain sebagainya

Prinsip perkawinan yang ada di Indonesia ini dibangun di atas karakter mempersulit terjadinya perceraian, dan ini sejalan dengan hadis Rasul yang

⁸Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli, *Hasyiyatani*, Juz.3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 206. Dia adalah tergolong seorang dari fuqaha Syafi'iyah.

berbunyi; Perbuatan yang halal tapi paling dimurkai Allah adalah talak.⁹

Berangkat dari tujuan ideal seperti dikemukakan, bila ternyata perceraian itu tetap juga terjadi, apalagi sangat semarak maka jelas telah terjadi paradok antara konsep ideal dengan realitas yang terjadi, karenanya sangat pantas mencari motif perceraian tersebut, terutama motif dominan dari keseluruhan perceraian yang terjadi.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), karenanya penulis akan meneliti langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang sesungguhnya ada di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yaitu menyangkut Motif (alasan) perceraian di Pengadilan Agama Medan dengan cara mempelajari perkara tahun 2008, baik terhadap Hakim, Panitera, dan Ketua Pengadilan Agama Medan, demikian juga terhadap data-data dan dokumen Pengadilan Agama tersebut.

Sesuai kelayakan metode dengan kebutuhan judul penelitian ini maka dalam pengumpulan data penulis

⁹ Abi Daud, Sunan Abi Daud, Juz.6, hlm. 406., juga, Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz. 6, hlm. 261, Juga, Al-Baihaqi, Sunan Al-Baihaqi, Juz. 2, 404, dll.

menggunakan metode phenomenology dengan pendekatan sosiologis.

a. Informan

Sejalan dengan hal itu maka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pihak Pengadilan Agama Lubukpakam yang terdiri dari; Ketua Pengadilan Agama, Hakim, Panitera, dan Pegawai Pengadilan Agama. Selanjutnya ditambah dengan pasangan suami isteri yang melakukan perceraian itu. Hal itu adalah sebagai berikut;

Dari keseluruhan perseraian diambil dua pasang perceraian saja, yaitu;

- Suami 2 orang
- Isteri 2 orang

Pimpinan Instansi terkait;

- Ketua Pengadilan Agama 1 orang

Dari 16 Hakim yang ada diambil 5 orang hakim saja yang terdiri dari;

- Hakim pria 3 orang
- Hakim wanita 2 orang

Dari 17 orang panitera yang ada maka diambil 3 orang saja, yaitu;

- Panitera pria 2 orang
- Panitera wanita 1 orang

Jumlah 13 orang

Sesuai kelayakan, kebutuhan dan aspek representativitas penelitian ini dihubungkan kecukupan data, dan keterwakilan informannya maka penentuan informan dalam penelitian ini, demikian juga dengan jumlahnya bisa saja berkembang sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan.

b. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpul data berupa;

- Wawancara (*interview*), yaitu dengan mewawancarai responden yang telah ditentukan.
- Studi dokumen, yaitu dengan mendapatkan informasi lewat data dan dokumen Pengadilan Agama Medan.

2. Metode pengolahan dan analisis data

Setelah data terkumpul, peneliti mengolah dan menganalisis data dengan menggunakan Case study metod (Metode studi kasus), yaitu mempelajari kasus-kasus yang ada, dan mencoba mengkonstruksi ulang terhadap peristiwa yang terjadi.

Dari keseluruhan perkara yang ada maka berangkat dari sistem keterwakilan dan kelayakan, bahkan kemampuan penelitian ini yang akan dibahas dan dianalisis hanya terbatas kepada tiga perkara, namun supaya lebih kaya sengaja

ditampilkan perkara dengan motif perceraian yang berbeda antara satu sama lainnya. Hal itu sebagai berikut;

- Perceraian dengan motif Tidak Ada Tanggung Jawab	1 perkara
- Perceraian dengan motif Tidak Ada Keharmonisan	1 perkara
Jumlah	2 perkara

Penentuan perkara dengan dua motif ini dilakukan adalah sehubungan dengan kedua motif inilah perkara perceraian dengan motif paling dominan.

3. Bentuk penelitian

Penelitian ini ditentukan dalam bentuk penelitian deskriptif kualitatif, yaitu peneliti akan memberikan paparan tentang kondisi real motivasi perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2008, dan akan disajikan dalam bentuk paparan kualitatif semata.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, peneliti membuat sistematikanya sebagai berikut;

Bab I disajikan dalam judul Pendahuluan, yang berisi; Latar-belakang masalah, Masalah dan Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Pembatasan istilah, Kajian teoritis, Langkah-langkah penelitian dan Sistematika Pembahasan ini.

Pada Bab II ditentukan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang terdiri dari; Kewenangan mengadili perkara, Struktur dan Personalia Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan Penanganan perkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Selanjutnya pada Bab III berkenaan dengan Perceraian di Indonesia, yang meliputi; Pengertian Perceraian, Alasan perceraian, dan Proses perceraian.

Kemudian dilanjutkan dengan Bab IV sebagai bab inti yang berkenaan dengan Motivasi Perceraian di PA Lubuk Pakam Pada Tahun 2008, yang berisi tentang; Jumlah perceraian, Motivasi perceraian, dan Contoh Motif Perceraian di PA Lubuk Pakam.

Bab V adalah bab terakhir yang dinyatakan sebagai Penutup, dan berisi tentang; Kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

A. Kewenangan Mengadili Perkara

Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagaimana halnya Pengadilan Agama pada umumnya di seluruh Indonesia adalah sebuah lembaga yang berwenang mengadili perkara-perkara tertentu (khusus) pada tingkat pertama yang berada di daerah yurisdiksinya, yaitu Kabupaten Deli Serdang.

Hal ini diatur di dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan Perkara-perkara tertentu (khusus) yang menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama tersebut adalah meliputi;

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan

i. ekonomi syari'ah.¹⁰

Kelanjutan pasal tersebut memperjelas makna perkawinan itu dengan ungkapan; "Bidang-bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku."¹¹ Selanjutnya, yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu mencakup 22 persoalan perkawinan sebagai berikut;

1. izin beristri lebih dari seorang
2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;

¹⁰ Pasal tersebut berbunyi; Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadaqah, dan i. ekonomi syari'ah. Sementara disbanding dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 pada pasal 49 ternyata hanya mendapat penyempurnaan tentang masuknya "Ekonomi Syari'ah" meskipun sajiannya dalam klasifikasi yang berbeda sebagai berikut; "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; a. perkawinan, b. kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, c. wakaf dan shadaqah.

¹¹ Ibid.

3. dispensasi kawin;
4. pencegahan perkawinan;
5. penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. pembatalan perkawinan;
7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. perceraian karena talak;
9. gugatan perceraian;
10. penyelesaian harta bersama;
11. mengenai penguasaan anak-anak;
12. ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
14. putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. pencabutan kekuasaan wali;
17. penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;

20. penetapan asal usul seorang anak;
21. putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. pernyataan tentang sahnyanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Sejalan dengan hal tersebut terlihat perkara yang ditangani PA Lubuk Pakam pada tahun 2008 berjumlah 829, yang terdiri dari empat belas jenis perkara, dengan segala keadaannya, dapat diuraikan sebagai berikut.

TABEL PERKARA YANG DITANGANI PA LUBUK PAKAM
PADA TAHUN 2008¹²

N O	JENIS PERKARA	DI KA BUL KAN	DI TO LAK	GU- GU R	DI CO RET	DI CA BUT	JUM LAH
1	Cerai gugat	460	1	19	3	34	517
2	Cerai Talak	179	5	8	2	10	204

¹² *Buku Laporan Tahunan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Tahun 2008*, hlm. 11

3	Kewarisan	5	3	-	-	1	9
4	Isbat Nikah	64	-	-	-	-	64
5	Pembatalan Nikah	2	-	1	-	1	4
6	Izin Poligami	2	-	-	-	-	2
7	Perwalian	4	-	-	-	-	4
8	Harta Bersama	2	1	-	1	3	7
9	Penet. Ahli Waris	10	-	-	-	-	10
10	Hadhonah	3	-	-	-	1	4
11	Pengangkatan Anak	3	-	-	-	-	3
12	Hibah	-	-	-	-	-	-
13	Wakaf	-	-	-	-	-	-
14	Wali Adhal	-	-	-	-	-	1
JUMLAH		734	10	29	6	50	829

Memperhatikan akan hal ini maka perkara perceraian yang menjadi bahasan judul penelitian ini termasuk di dalamnya. Hal ini dapat dilihat pada poin 8 tentang perceraian karena talak, yaitu perceraian yang upaya mendapatkannya datang dari pihak suami, dalam hal ini suami memang

ditempatkan sebagai pemilik hak talak, tapi hal itu tidaklah semauanya untuk dilepaskan, melainkan harus terlebih dahulu memperoleh pertimbangan dan izin dari Pengadilan, maka suami mengajukan dan memperlihatkan kepadanya bahwa perceraian yang dia inginkan itu betul-betul sudah sangat beralasan.

Demikian juga halnya dengan poin 9, yaitu gugatan perceraian. Perceraian dalam bentuk ini adalah perceraian yang inisiatif awalnya berasal dari isteri, dan perceraian seperti ini menggambarkan bahwa isteri memang tidak berhak untuk menceraikan tetapi memiliki kesempatan untuk berupaya melepaskan diri dari perkawinan yang menurutnya sudah tidak kondusif lagi baginya sehingga dia menggugat suami untuk dapat menceraikannya, bahkan memohon kepada Pengadilan untuk dapat memaksa suami menceraikannya, atau minimal atas putusan pengadilan.

B. Struktur dan Personalia Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Struktur Pengadilan Agama memiliki keseragaman untuk seluruh daerah Indonesia, dan sifatnya baku sesuai ketentuan yang ada. Sejalan dengan hal itu maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam pun diperlakukan sama seperti

Pengadilan Agama pada umumnya. Struktur tersebut adalah sebagai berikut;¹³

- Panitera
- Wakil Panitera, yang memimpin kepaniteraan, dan membawahi :
 - a. Panitera Muda Gugatan
 - b. Panitera Muda Permohonan
 - c. Panitera Hukum
 - d. Kelompok Fungsional Kepaniteraan dan Panitera Pengganti
- Wakil Sekretaris, yang memimpin sekretariat, dan membawahi :
 - a. Kepala Sub Keuangan
 - b. Kepala Sub Umum
 - c. Kepala Sub Kepegawaian
- Selain itu terdapat Kelompok Fungsional Hakim, Panitera Pengganti, dan Jurusita.

Untuk mengisi struktur seperti dikemukakan di atas, maka sampai pada tanggal 17 Juli 2009 (saat penelitian ini dilaksanakan) maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam diisi oleh 44 orang personil yang lengkap mengemban tugas pada

¹³ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1996

semua job dan struktur Pengadilan Agama yang ada. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut;¹⁴

TABEL STRUKTUR ORGANISASI

PA LUBUK PAKAM TAHUN 2009

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs.H.Abd. Hamid Plg., SH.,MH.	Ketua
2	Dra.Hj. Neliati, SH.	Wkl. Ketua
3	Dra. Rubiah	Hakim
4	Mahmuddin, SH	Hakim
5	Drs. H.Burhanuddin Hrp., SH.	Hakim
6	Drs.Sudirman Batubara, SH.	Hakim
7	Dra. Masdaniar, SH.	Hakim
8	Drs. Bakti Ritonga, SH., MH.	Hakim
9	Drs.Muhammad Amin, SH., MH.	Hakim
10	Dra. Hasina Hasan, SH., MH.	Hakim
11	Drs. Taufik, SH.	Hakim
12	Robinhot Kaloko, SH., MH.	Hakim
13	Dra. Mardiah, SH., MH.	Hakim
14	Drs. H. Imbalo, SH., MH.	Hakim
15	Drs. Mhd. Dongan, SH.	Hakim
16	Dra. Rabbiah Adawiyah Nst.	Hakim
17	Parluhutan, SH.	Panitera
18	H. Zainul Arifin	Wasek/PP

¹⁴ Data statistik Pengadilan Agama Lubuk Pakam tahun 2009

19	Ahmad Fadli, SH.	P.Mud.Ggt
20	Dra. Hj. Maisarah	P.Mud.Perm
21	Siti Hawani, SH.	P.Mud.Hkm
22	Suwarman, SH.	Ka. Umum
23	Hasbin, SH.	Ka.Ku.PP
24	Nurchahaya Hsb., SH.	Ka.Kepeg
25	Badariyah, S.Ag.	Panti
26	Ferial Sita, S.Ag	Panti
27	Priono, SH.	Panti
28	Helmiah Hasibuan, S.Ag.	Panti
29	Siti Aisah Harahap, SH.	Panti
30	Rusnani, SH.	Panti
31	Latifah, SH.	Panti
32	Yulisma, SH.	Panti
33	Mahmun, S.Ag.	Panti
34	Ali Ahman, Sh.	Panti
35	Mhd. Hermansyah, SH.	Juru Sita
36	Ruli Asrizal	JS.Pengg
37	Amat Lugito	JSP/Bend
38	Nur Azizah	Kasir
39	Zainal Arifin	Juru Sita
40	Pahrudin Ritonga, SHI	Cakim
41	Mhd. Irfan, SHI	Cakim
42	Ellyda Hanum	Staf Umum
43	Surya Darma Oanjaitan,SHI	PNS
44	Salamat Nasution, SHI	Capeg

C. Penanganan Perkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Secara umum, penanganan perkara di Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah berjalan dengan baik. Paling tidak hal ini dapat dilihat dari tiga hal, yaitu; 1). Penyelesaian tugas, 2). Kemampuan mendamaikan para pihak, 3). Kepuasan pengguna jasa Pengadilan Agama. Lebih lanjut hal ini dapat dilihat sebagai berikut;

Pertama, dengan membanding perkara yang masuk kepada perkara yang diputus maka terlihat Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah bekerja dengan maksimal. Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah menerima perkara pada tahun 2008 sebanyak 943 perkara, dan telah menyelesaikannya sebanyak 829 perkara, dan sisa sebanyak 112 perkara. Dengan perincian sebagai berikut;

Perkara yang diterima terdiri dari:

- Gugatan : 783 perkara
- Permohonan : 87 perkara
- Sisa akhir bulan Desember : 73 perkara

		+
Jumlah	: 943 perkara	
Telah diselesaikan	: 829 perkara	
<hr/>		
Sisa	: 112 Perkara	

Sisa perkara tahun 2008 tersebut terlihat kecil dan rasional setelah memperhatikan rinciannya sebagai berikut;

- Perkara PP No.10/1983 Jo. PP No.45/1990 : 6 perkara
- Perkara yang diumumkan : 18 perkara
- Perkara mohon bantuan ke PA lain : 13 perkara
- Perkara yang diterima akhir Desember 2008: 56 perkara

Jumlah :114 perkara

Sesungguhnya sisa perkara adalah 56 ini bukan tidak terselesaikan tetapi sedang berada dalam proses. Mengingat perkara ini baru diterima pada akhir bulan Desember maka sesuai tradisi penanganan yang umum di PA itu sendiri ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sampai kepada para apihak dipanggil, disidang dan perkaranya diputus, maka karena masa yang sangat singkat, perkara ini pun masih dalam proses dan belum bisa diselesaikan.

Kedua, dari keseluruhan perkara yang berhasil diselesaikan itu sebanyak 829 perkara, ternyata ada sejumlah perkara yang penyelesaiannya dengan cara damai/dicabut, yaitu sebanyak 50 perkara. Hal ini adalah sebagai berikut;

Rincian perkara tahun 2008 sebagai berikut ;

- Dikabulkan : 734 perkara
- Ditolak : 10 perkara
- Tidak diterima : - perkara

- Digugurkan	:	29 perkara
- Dicoret	:	6 perkara
- Damai/Dicabut	:	50 perkara
<hr/>		
Jumlah	:	829 perkara

Adanya 50 perkara yang berhasil didamaikan/dicabut di Pengadilan dalam setahun adalah jumlah yang terbilang cukup lumayan. Mengingat pada umumnya orang pergi ke Pengadilan adalah karena tidak berhasil berdamai, lalu tidak ada jalan lain lagi kecuali dengan membawanya kepada aspek penegakan hukum, dengan harapan agar hakim memberikan ketegasan tentang siapa yang benar dan salah di antara mereka maka mereka pun menghadap di Pengadilan. Lantas dalam kesempatan ini mereka kembali mengurungkan niatnya karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh hakim. Ini adalah prestasi hakim, sehubungan dengan perdamaian adalah keputusan yang terbaik.

Ketiga, kepuasan pengguna jasa pengadilan terlihat cukup maksimal. Dari sebanyak 829 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2008 tersebut terlihat hanya ada sebanyak 6 perkara yang minta banding ke Pengadilan Tinggi Agama. Jumlah ini cukup fantastic, karena hanya ada 0,72 % dari keseluruhan jumlah perkara yang sudah diputus tersebut. Angka ini jauh lebih rendah dari rata-rata upaya banding yang dilakukan di tingkat Nasional sebanyak

BAB III

PERCERAIAN DI INDONESIA

A. Pengertian Perceraian

Hukum Islam di Indonesia, menempatkan perceraian dalam kajian "Putusnya Perkawinan". Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan dapat putus karena; a. kematian, b. perceraian, dan c. atas keputusan Pengadilan.¹⁶ Putusnya perkawinan adalah ungkapan yang lebih umum dari perceraian, sementara perceraian itu adalah bagian dari sub sistem putusnya perkawinan.

Kematian ternyata dipahami sebagai penyebab putusnya perkawinan di Indonesia ini. Hal ini sejalan dengan pandangan Hanafiyah, di mana meninggalnya salah seorang dari pasangan suami isteri itu mengakibatkan perkawinan telah bubar. Logika ini dibangun demikian, dan akhirnya menimbulkan konsekwensi di mana misalnya suami yang ditinggal mati oleh isterinya tidak boleh memandikannya karena perempuan itu telah haram dilihat, diperhatikan, apalagi dipeganginya pada saat memandikan tersebut, dengan alasan perkawinan mereka sesungguhnya telah bubar yang diakibatkan oleh salah satu pihak telah meninggal dunia. Hal

¹⁶ Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan : IAIN Press, 1995), hlm. 43

ini mengakibatkan bahwa hukum yang berlaku terhadap mantan isterinya itu baginya sama dengan hukum terhadap wanita anjabi secara umum.¹⁷

Di dalam KUH Perdata, istilah putusnya perkawinan itu disebut dengan "Pembubaran Perkawinan (*onbinding des huwelijks*)". Hal ini seperti diatur di dalam Bab X pada pasal 199 yang berisi tentang Pembubaran perkawinan pada umumnya, pada pasal 200 - 206b tentang Pembubaran perkawinan setelah pisah meja dan ranjang, dan pada pasal 207 - 232a yang mengatur tentang Perceraian perkawinan.¹⁸ Meskipun dijumpai perbedaan redaksi ternyata keduanya mengarah kepada kesamaan makna.

Secara sederhana, perceraian dapat dimaknai dengan putusnya perkawinan, atau pun bubarnya perkawinan yang terjadi atas inisiatif atau kemauan salah seorang dari suami isteri, atau pun keduanya dengan alasan dan prosedur yang telah ditentukan untuk itu.

Dalam hukum Islam Indonesia, dan demikian juga halnya dalam kajian Islam klasik, memahami bahwa

¹⁷ Berbeda dengan fikih Syafi'i yang mengatakan bahwa suami masih diperkenankan untuk memandikan isterinya yang telah meninggal, karena isteri itu tetap dipahami sebagai isteri meskipun dia telah terlebih dahulu meninggal dunia, Fikih Hanafi. Dan fikih Sayafi'i

¹⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan di Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 160

perceraian itu dapat terjadi bukan hanya karena keinginan suami semata tetapi juga karena keinginan oleh isteri. Perceraian oleh suami itu cenderung terjadi karena suami tersebut melepaskan hak talak yang dimilikinya, sedang perceraian yang datang dari pihak isteri itu oleh fikih klasik disebut dengan cara khulu` dan fasakh, sedang oleh hukum Islam Indonesia disebut dengan putusan Pengadilan. Ini mempertegas tentang adanya kesempatan masing-masing suami isteri untuk melepaskan diri dari perkawinan yang mereka bangun sebelumnya di mana ternyata tidak membawa kebahagiaan lagi bagi mereka.

Ditinjau dari segi hak inisiatif untuk melakukan perceraian maka perceraian itu dibagi dua, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Hal itu adalah sebagai berikut;

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara memutuskan akad nikah yang dibenarkan dalam Islam dengan cara suami secara suka rela melepaskan talak yang dimilikinya dengan kata-kata. Dalam kajian fikih klasik dinyatakan dengan kata-kata yang jelas (sharih) atau pun dalam bahasa sindiran tetapi dimaksudkan dengan talak.¹⁹ Dalam hal ini seolah suami ditempatkan sebagai pihak pemegang hak prerogative talak, serta pemilik hak prerogative untuk melepaskannya.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka kartini, Cet., ke-1, 1990), hlm. 230

Cerai gugat adalah perceraian yang datang dari pihak isteri, baik diajukan langsung olehnya atau kuasanya di Pengadilan yang mewilayahi hukum tempat kediamannya (penggugat), dan ke dalam hal ini dimasukkan gugatan khuluk yang diajukan oleh isteri kepada suaminya.²⁰

Dahulu, sebelum tahun 1989 cerai gugat ini disebut dengan gugatan cerai. Setelah lahirnya Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama lalu istilah cerai dalam bentuk ini berubah namanya menjadi cerai gugat. Di samping istilah tersebut menjadi semakin simple, juga tersirat didalamnya akan adanya kesetaraan hak antara suami dan isteri itu untuk melakukan perceraian, yaitu antara "cerai talak" dengan "cerai gugat" di desing redaksinya menjadi selevel dan setara dengan mendahulukan kata cerai, kemudian diiringi istilah talak bila datang dari perceraian itu dari pihak suami, dan istilah gugat bila datang dari perceraian itu dari pihak isteri, sedang untuk sulit dan mudahnya memperoleh kedua hal itu, ternyata telah ditata dalam system yang cenderung sama. Perubahan istilah ini turut disemangati oleh adanya keinginan untuk mempertegas keberadaan hak wanita dalam perceraian.

Bila suatu ketikaternyata suami tidak mau mengucapkan talak sama sekali padahal perkara cerai gugat

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 301

yang diajukan oleh isteri dipahami telah layak untuk diberi perceraian, dan hakim telah yakin bahwa hal itulah yang terbaik bagi mereka maka perceraian dalam bentuk inilah yang disebut dengan perceraian lewat "Putusan Pengadilan". Bila suami sudah bertekad bahwa tidak akan ada kata talak yang lahir dari padanya sampai kapan pun dengan tidak memperhatikan kelemahan-kelemahannya sebagai suami, dan hal itu sudah nyata dan terbukti di Pengadilan, karena bisa saja dia tidak menggunakan rasionalitas lagi dalam menyelesaikan persoalan ini, bisa saja oleh rasa cintanya yang berlebihan kepada isteri, atau sebaliknya suatu upaya dalam rangka menghukum isteri yang dipahami tiada maaf lagi, atau aspek lain yang bisa saja terjadi sehingga hal ini dilakukan, maka hukum Indonesia telah member solusi akan hal ini lewat cerai gugat yang berdampak pada pembubaran perkawinan lewat putusan Pengadilan. Dengan ini hak isteri untuk melepaskan diri dari perkawinan yang dipahaminya sudah tidak membawa kebahagiaan lagi, tetapi cenderung sebaliknya yaitu kesengsaraan dan penderitaan tetap akan bisa terselesaikan.

Dengan penjelasan seperti dikemukakan, kemudian dihubungkan kepada kajian "putusnya perkawinan" seperti yang tertuang di dalam pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut maka perceraian dimaksud di di sini adalah; a. perceraian itu sendiri, b. putusan Pengadilan, sedang putusnya perkawinan karena kematian

salah satu pihak dari suami atau isteri itu tidak termasuk dalam bahasan ini. Motif perceraian yang pada umumnya dapat diamati secara ilmiah itu adalah perceraian lewat kedua hal seperti dikemukakan, karena perceraian dalam bentuk ini adalah perceraian yang terjadi akibat keinginan dan usaha suami dan isteri itu sendiri, sedang putusnya perceraian yang diakibatkan oleh kematian tersebut tidaklah bisa dikatakan sebagai perceraian yang terjadi atas keinginan oleh suami isteri tetapi cenderung sebagai takdir Tuhan, karena pada umumnya suami isteri itu telah berjuang bersama untuk mengobati penyakit, tetapi ternyata mereka tidak berhasil, dan usaha mereka kandas oleh takdir Tuhan yang mematikan salah seorang dari mereka, lalu secara suka atau tidak suka mereka terpaksa berpisah untuk selamanya, maka hal ini tidak dimasukkan sebagai perceraian yang hendak dicari alasan (motif) dari padanya. Perceraian yang akan dibahas dalam kesempatan ini adalah dua macam bentuk perceraian seperti telah dikemukakan, yaitu perceraian yang inisiatif ceranya dating dari pihak suami, dan juga dari pihak isteri.

B. Alasan Perceraian

Perceraian di Indonesia tidaklah bisa dilaksanakan hanya dengan kemauan para pihak, misalnya suami. Jika suami ingin menceraikan isterinya sudah barang tentu harus memiliki

alasan yang jelas dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal itu adalah sebagai berikut;

Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 telah memformulasi alasan perceraian dan menyimpulkannya menjadi 6 (enam) macam, sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukn lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya khusus bagi umat Islam, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menambah dan

menyempurnakannya menjadi 8 (delapan) macam, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Dengan tidak mengurangi maksud dari pasal 19 PP seperti dikemukakan di atas, ternyata KHI menambahnya

dengan; a. pelanggaran terhadap taklik talak, dan b. murtad yang mengakibatkan ketidak-rukunan. Kedua hal ini dipahami masih sejalan dengan alasan bahwa, Pertama, mengingat format shigat taklik talak yang diucapkan pada setiap perkawinan yang ada di Indonesia ini adalah dihubungkan kepada perceraian, sehingga kehadiran nya di sini tidak lah merupakan sesuatu yang baru., Kedua, Murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidak-rukunan, mengingat hal ini diperuntukkan khusus bagi umat Islam saja, sedang pemahaman yang umum dalam Islam itu tidak memperbolehkan pemeluknya untuk menikah berbeda agama, kemudian pendirian seperti ini telah dipertegas dalam dalam pasal 40 KHI tentang larangan menikahi wanita non muslim, dan pasal 61 tentang pencegahan perkawinan terhadap calon mempelai yang tidak sekufu, dalam hal ini makna tidak sekufu itu hanyalah jika pasangan suami isteri itu berlainan agama, maka tepatlah kalau dalam pasal 116 nya diadibikan bahwa murtad yang mengakibatkan ketidak-rukunan sebagai alasan perceraian. Karenanya, kehadiran kedua aspek ini dalam bingkai alasan perceraian dapat dimaklumi.

Apabila kita perhatikan alasan-alasan perceraian tersebut maka kita dapat mengatakan bahwa hal itu cenderung mengadopsi hukum colonial Belanda yang pernah menancapkan kukunya di Indonesia ini, dan sekarang mereka telah lama pergi. Alasan-alasan tersebut, mulai dari alasan

zina, menjadi pemobuk, salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya, mendapat hukuman pidana penjara lima tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan penganiayaan terhadap pihak lain, aspek ketidak rukunan, dan lainnya adalah merupakan isi dari pasal 52 Staats blad 1933-74, demikian juga pada pasal 208 BW. Bukan hanya KHI yang secara khusus berlaku bagi umat Islam, tetapi UU Nomor 1 Tahun 1974 pun yang dinyatakan berlaku secara Nasional sekarang ini ternyata sangat dominan dipengaruhi oleh hukum Belanda semasa kolonialismenya dulu.

Semua alasan perceraian seperti telah dikemukakan di atas dinyatakan sebagai "alasan alternatif", bukan "kumulatif". Artinya, perceraian itu dapat saja terjadi meskipun hanya dengan menggunakan satu alasan saja (berpilih), sebaliknya bukan mesti dijumpai semuanya. Jadi bisa saja satu dari alasan ini telah dijumpai pada diri suami atau isteri, dan ini menjadi kelemahan baginya, sekaligus dapat dipergunakan sebagai alasan perkara perceraian oleh pasangannya di Pengadilan. Hanya dengan satu alasan saja pun seperti dijumpai pada pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 KHI tersebut telah dapat membubarkan perkawinan suami isteri itu.

Bila kita menganalisis semua alasan perceraian tersebut ternyata hamper semua alasan tersebut adalah alasan yang bersifat statis, kecuali satu, yaitu aspek ketidak rukunan dapat dinyatakan sebagai alasan yang aktif atau actual. Sesungguhnya semua alasan perceraian itu tidak dapat

dijadikan sebagai alasan perceraian di saat mereka masih hidup rukun dan sedang membina rumah tangga yang harmonis, sebab rumah tangga seperti ini tidak boleh dibubarkan, tetapi jika alasan itu dibarengi dengan ketidakrukunan lagi barulah hal itu benar-benar menjadi alasan perceraian yang dapat dijadikan alasan untuk membubarkan perkawinan itu, karenanya yang menjadi alasan perceraian itu sesungguhnya hanyalah "ketudak-rukunan", bahkan walaupun semua alasan itu tidak dijumpai tapi mereka tidak bisa hidup rukun lagi maka hal ini dapat menjadi pemicu terjadinya perceraian. Tidak heran kalau sebagian Negara-negara di Barat, misalnya Australia, Amerika, dan yang lainnya hanya mencantumkan satu saja alasan perceraian, yaitu tidak rukun. Ini menjadi fakta tentang betapa aktualnya alasan tidak rukun itu menjadi alasan perceraian.

Bila hal ini kita banding dengan kajian Islam ala fikih klasik, terutama saat membahas perceraian yang datang dari pihak suami ternyata semua alasan itu tidak ada artinya sama sekali. Fikih klasik tidak membicarakan alasan perceraian yang dilakukan oleh suami lewat media talak, tetapi menempatkan talak itu sebagai suatu yang eksklusif, yaitu talak bisa saja terjadi setiap saat, kapan, dan di mana, dengan suatu alasan, atau pun tidak sama sekali, bahkan lebih dari itu, talak yang diucapkan pada saat main-main pun dinyatakan jatuh (memiliki akibat hukum). Hal ini sejalan dengan sabda Rasul yang berbunyi ; *"Ada tiga hal yang kalau dilakukan dengan*

sungguh-sungguh maka hasilnya sungguh-sungguh dan sebaliknya kalau dilakukan dengan main-main maka hasilnya tetap sungguh-sungguh, ketiga hal itu adalah; nikah, talak, dan rujuk."²¹ Dalam hal ini suami ditempatkan sebagai pemilik hak mutlak terhadap talak tersebut, lalu dia dapat melepaskannya secara absolut pula.

C. Proses Perceraian

1. Tempat Perceraian

Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa "Perceraian hanya dapat dilangsungkan di depan siding Pengadilan". Ketentuan ini membuat sempit dan terbatasnya tempat untuk melangsungkan perceraian, yaitu "Pengadilan" semata, konsekwensinya hukum tidak mengakui seluruh perceraian yang dilaksanakan di tempat lain, misalnya di rumah, di kantor, di pasar, atau yang lainnya. Berarti tidak ada kebebasan lagi bagi setiap orang untuk memilih tempat mengsungkan perceraian.

²¹ Hadis dari Abi Hurairah dalam riwayat Abu Daud, pada Hadis yang ke-2194, dan 2196, Juga dari Abi Hurairah, dalam riwayat Turmuzi, pada hadis yang ke-1221, Juga dari Abi Hurairah dalam riwayat Ibn Majah pada hadisa yang ke-2039, dan 2117, Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Mesir: Mauqi` wizarah al-Auqaf al-Misriyah, t.t.), Juz.1, hlm. 666, dan juz. 6, hlm. 428., Juga, Turmuzi, Sunan al Turmuzi, (Mesir: Mauqi` Wizarah al-Auqaf al-Misriyah, t.t., Juz.5), hlm. 49, Juga Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, (Beirut: Darul Fikri, t.t.), Juz.1, hlm. 658, dan juz. 6, hlm. 294., dan lain sebagainya.

Penentuan tempat seperti ini terkait dengan pengakuan eksistensi perceraian itu sendiri. Hanya perceraian yang dilangsungkan di depan siding Pengadilan yang memiliki akibat hukum, artinya perceraian yang dilangsungkan di tempat ini dipahami telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada, diakui oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia ini, dan segala konsekwensi yang lahir dari padanya mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya bila perceraian itu dilaksanakan di tempat lain maka hal itu dipahami belum ada, dan hanya menjadi tanggung-jawabnya sendiri. Tempat perceraian di Indonesia ini telah dibuat secara terkendali.

Terkait dengan Pengadilan mana yang berwenang untuk dijadikan sebagai tempat melaksanakan perceraian itu maka hal ini dikaitkan dengan asas personalitas keagamaan. Bagi setiap orang Islam dengan tanpa kecuali, yaitu penduduk Indonesia asli, Eropah, TimurAsing atau yang lainnya tentu mereka akan melaksanakan perceraian itu di Pengadilan Agama, sedang bagi yang lainnya di Pengadilan Umum. Dalam hal ini persoalan agama dijadikan sebagai tolok untuk menentukan Pengadilan tempat mereka melangsungkan perceraian tersebut.

Hal ini sejalan dengan maksud pasal 63 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut;

Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang Undang ini ialah;

- a. Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya

Bila hal ini dikaitkan dengan peralihan agama bukanlah secara serta merta akan menukar Pengadilan tempat mereka akan melangsungkan perceraian. Misalnya pasangan suami isteri beragama Islam, dan mereka telah melangsungkan dengan pengawasan dan pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN) dari Kantor Urusan Agama (KUA), dengan demikian jalur perceraian mereka yang seharusnya adalah Pengadilan Agama. Namun bila suatu ketika salah seorang dari mereka, atau kedua murtad bukanlah secara otomatis akan menukar jalur Pengadilan mereka, tetapi mereka tetap ke Pengadilan Agama, karena inilah Pengadilan mereka yang ideal dari konsep semula mereka melangsungkan perkawinan. Jika salah seorang yang masih bertahan dengan agama Islam tersebut komit dengan pendirian bahwa suami isteri itu harus seagama, dan akhirnya dia ingin melepaskan diri dari perkawinan tersebut, dimana suaminya murtad, maka dia cukup mengajukannya ke Pengadilan Agama karena Pengadilan inilah yang berwenang untuk menyelesaikannya. Namun bila keduanya ternyata murtad, mereka dapat memperbaharui surat dan pencatatan perkawinan mereka menjadi berada di Kantor Catatan Sipil, sehingga jika suatu waktu nanti mereka ada persoalan, misalnya ingin

melangsungkan perceraian maka tempat untuk melangsungkannya adalah Pengadilan Umum.²²

Bila hal ini dibanding dengan ketentuan yang ada dalam fikih klasik ternyata tidak ada aturan tempat bagi suami untuk melangsungkan perceraian, sementara bila perceraian itu datangnya dari pihak isteri berupa faskh barulah memerlukan kekuatan Pemerintah untuk memaksa suami untuk berkenan melepaskan isterinya dari ikatan perkawinan yang tidak harmonis itu lagi. Suami memiliki hak tak terbatas terhadap talak sehingga dia bebas untuk melepaskannya di tempat mana saja dia mau, sebaliknya jika suami tidak berkenan untuk menceraikan isterinya, sementara si isteri tidak berkenan lagi untuk mendampingi suaminya dan di sini terdapat perbedaan kepentingan yang tidak mungkin untuk dipersatukan lagi maka si isteri itu dapat meminta kekuatan Pemerintah untuk memaksa suami itu berkenan melepaskan isterinya. Dengan hal ini hak isteri untuk tetap terlindungi dari keterperangkapan dalam perkawinan yang mencengkram itu dapat diayomi.

Adanya pembatasan kewenangan suami dalam perceraian ini dipahami sesuai dengan maslahat dan dinamika perkembangan masyarakat yang ada. Hal ini paling tidak dapat diamati dari hal berikut ini;

²² M Jamil Latif, Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta : Bulan Bintang, 1983), hlm.47-48.

a. Perceraian itu boleh tapi dimurkai Tuhan

Dalam hadis yang disampaikan oleh Abdullah Ibn Umar dalam riwayat Abi Daud Rasul Saw bersabda²³ أَبْقِضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى (perbuatan yang halal tapi paling dimurkai Allah Ta'ala adalah talak). Hadis ini mengindikasikan bahwa Allah sangat berkeinginan supaya talak ini jangan terjadi, maka upaya Pemerintah untuk mengendalikan tempat melangsungkan perceraian ini adalah salah satu upaya untuk mengimplementasikan tujuan itu (memkerpecil terjadinya talak). Dengan hal ini akan tersaringlah perceraian yang benar-benar serius dengan perceraian yang temporal karena factor emosi dan yang lainnya, dan akan berdampak pada kecilnya angka perceraian.

b. Pemerintah berhak melakukan modifikasi untuk kepentingan maslahat

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi,²⁴ تُصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطًا بِالمَصْلَحَةِ (apa pun yang dilakukan oleh Penguasa dalam rangka pengayomannya terhadap rakyat erat kaitannya dengan maslahat). Ini member pemahaman kepada kita bahwa apa pun yang dilakukan oleh

²³ Hadis ini dijumpai pada Sunan Abi Daud, hadis yang ke-2178, dan 2180, juga, Sunan Ibn Majah pada hadis yang ke-2096, dan 2018., Abu Daud, ibid., Juz.1, hlm. 261, dan juz. 6 hlm. 661. , Juga, Ibn Majah, ibid., Juz.1, hlm. 250, dan juz. 6, hlm. 261, dan lain sebagainya

²⁴ Ibn Nujaim, Al-Asybah wa al-Nazoir,

Pemerintah dalam rangka menciptakan maslahat pada pemerintahannya dapat saja dilakukan.

2. Tatacara Perceraian

Jika suami ingin menceraikan isterinya maka perkara ini disebut dengan perkara "permohonan cerai talak", sedang bila isteri yang menginginkan perceraian tersebut dan dia membawa perkaranya ke Pengadilan maka perkara ini disebut dengan nama "permohonan cerai gugat". Hal ini memperlihatkan bahwa perceraian itu boleh saja datangnya dari pihak suami dan boleh juga dari pihak isteri, keduanya memiliki kesempatan yang sama dan seimbang.

Arah datangnya perceraian itu ditentukan bersifat netral. Artinya masing-masing suami isteri memiliki hak dan kesempatan yang sama. Yang menentukan dalam perceraian itu adalah alasannya, bila alasan perceraian itu dilakukan oleh isteri maka suaminya yang akan mengajukan perceraian ke Pengadilan, demikian juga sebaliknya bila ternyata suami yang meakukan alasan perceraian itu maka isterilah yang akan dapat menggugatnya ke Pengadilan. Dengan ini menjadikan alasan perceraian itu yang menjadi pemicu perceraian itu bilamana ternyata dapat dibuktikan, dan hakim percaya dengan hal itu dalam proses siding Pengadilan.

a. Cerai talak

Jika suami ingin menceraikan isterinya maka suami harus mengajukan surat permohonan cerai ke Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal isterinya. Hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 66 UU No.7 Tahun 1989, yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- (3) Dalam hal termohon bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- (4) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
- (5) Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan

bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Ketentuan ini dipahami membela hak-hak wanita, di mana permohonan cerai yang dilakukan oleh suami harus dimasukkan di Pengadilan tempat kediaman isteri. Aturan pokok ini sesuai dengan asas yang mengatakan bahwa suatu gugatan perkara tidak boleh menyulitkan pihak tergugat dalam melaksanakan upaya membela dan mempertahankan kepentingannya. Asas ini dalam doktrin hukum disebut "actor sequitur forum rei", gugatan diajukan di tempat tinggal tergugat.

Dalam hal ini tentu akan menyulitkan bagi isteri untuk menghadiri persidangan untuk membelala hak dan kepentingannya bila persidangan diajukan di tempat kediaman suami. Misalnya suami bertempat tinggal di Bandung, sedang isteri bertempat tinggal di Surabaya, tentu akan sangat sulit bagi isteri untuk hadir ke Bandung pada setiap kali siding yang sesungguhnya permohonan suami belum tentu kebenarannya.

Sebenarnya kedua konsep ini bisa dipertemukan, yaitu bukan di tempat suami dan juga bukan pula di tempat isteri tetapai di tempat kediaman bersama. Tempat isteri dimaksud dalam pasal ini adalah tempat kediaman bersama, karena inilah tempat yang sesungguhnya bagi isteri, kecuali ia meninggalkannya, demikian juga dengan suami ini jugalah

tempat yang selayaknya baginya, kecuali dia meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut. Dengan demikian yang dimaksud di sini adalah tempat kediaman bersama.

Ketentuan ini ternyata berupa pembaharuan dari kenyataan sebelumnya di mana suami hanya mengajukan ke Pengadilan tempat kediamannya sendiri. Hal ini seperti terlihat pada pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut;

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Perceraian yang diinginkan oleh suami itu tidaklah dapat diajukan dengan keinginan semata saja, tetapi harus disertai dengan identitas yang lengkap, juga alasan kenapa perceraian itu diinginkan. Hal ini seperti terlihat dari maksud pasal Pasal 67 UU No.7 Tahun 1989 yang berbunyi sebagai berikut;

Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 66 di atas memuat:

- a. Nama, umur, dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami, dan termohon, yaitu istri;
- b. Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Setelah suami mengajukan permohonan cerai yang layak dan memenuhi syarat maka Pengadilan harus merespon dan menyikapinya. Hal ini juga seperti dimaksud oleh pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi sebagai berikut;

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Mengingat perceraian ini adalah berkaitan langsung dengan persoalan suami isteri, di mana mungkin ada hal-hal yang bersifat sangat rahasia maka siding untuk itu harus dinyatakan tertutup untuk umum. Mungkin ada persoalan yang terkait dengan rasa malu suami atau isteri bila hal itu terpublikasi secara umum, bisa saja aspek yang terkait dengan keadaan di ranjang dan sebagainya maka tidaklah layak untuk diperdengarkan kepada orang banyak. Karenanya persidangan tidak diperkenankan dihadiri oleh hadirin (penonton).

Hal ini sebagaimana diatur oleh pasal Pasal 68 UU Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

setelah berkas atau surat permohonan cerai talak didaftarkan di Kepaniteraan.

- (2) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan dalam sidang tertutup.

Sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, hakim harus terlebih dahulu mengupayakan perdamaian. Perdamaian dalam siding perdata, terutama masalah perceraian adalah bagian dari hukum acara yang harus dilaksanakan, pengabaian akan hal ini dapat berakibat terhadap tidak sahnya pemeriksaan tersebut. Dengan demikian perdamaian mutlak diperlukan.

Bila ternyata perdamaian tidak dapat dicapai barulah hakim dapat melanjutkan pemeriksaan acara perceraian tersebut. Upaya perdamaian ini harus ditempatkan di awal pemeriksaan perkara, dan inilah yang diutamakan dan dikedepankan. Bila ternyata upaya ini telah maksimal dilaksanakan namun tetap juga gagal, barulah tahapan selanjutnya dapat dilanjutkan.

Meskipun misalnya Pengadilan telah mengabulkan permohonan suami untuk melangsungkan perceraian, namun isteri bila mana tidak ingin dengan terjadinya perceraian itu, dan melihat masih ada sisi kebenaran padanya untuk mempertahankan haknya, maka dia dapat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Dalam hal ini ternyata isteri memiliki

kesempatan yang luas untuk membela hak-haknya di Pengadilan.

Bila ternyata isteri tidak dapat membela kepentingannya lagi dan putusan Pengadilan telah memiliki kekuatan tetap barulah Pengadilan menindak-lanjuti perceraian itu, dan menyempurnakan proses administratifnya. Hal ini adalah konsekwensi dari suatu keputusan dimana ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang, dan diduga bahwa suaminya yang benar dalam permohonannya, dan isteri tidak dapat membela diri lagi, dan akhirnya terjadilah perceraian.

Hal ini seperti terlihat dalam maksud pasal 70, 71, dan 72 UU Nomor 7 Tahun 1989;

Pasal 70 berbunyi sebagai berikut;

- (1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan.
- (2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat mengajukan banding.
- (3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.

(4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri atau kuasanya.

(5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya.

(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Pasal 71 berbunyi sebagai berikut;

(1) Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang ikrar talak.

(2) Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Setelah membahas akan permohonan cerai talak ini terlihat bahwa ada penguatan hak isteri dalam perceraian, sekaligus pembatasan keabsolutan hak suami yang dimiliki

selama ini. Suami yang ingin menceraikan isterinya tidak lagi secara otomatis dapat melakukan tindakan-tindakan sepihak untuk menceraikan isteri itu seperti yang tertuang dalam kajian fikih klasik, tetapi sekarang ini dia sudah berbagi hak dengan Pengadilan. Kumutlakan hak urusan pribadi suami dalam kebolehan talak, sebagian besar beralih ke tangan Pengadilan. Boleh atau tidaknya suami untuk mentalak isterinya tergantung pada pertimbangan dan penilaian Pengadilan, setelah terlebih dahulu Pengadilan mendengar sendiri pendapat dan bantahan isteri. Isteri mempunyai hak penuh membela kepentingannya dalam proses pemeriksaan persidangan yang bersifat "contradictoir" dalam kedudukannya sebagai pihak termohon. Isteri berhak mengajukan duplik, dan dia berhak mengajukan alat-alat bukti.²⁵

b. Cerai Gugat

Berbeda halnya dengan cerai, cerai gugat adalah perkara yang bersifat contestiosa (benar-benar sengketa). Perkara ini adalah murni sebagai sengketa keluarga di mana ada dua pihak yang saling bertentangan, di satu sisi isteri bertindak sebagai penggugat dan di sisi lain suami tampil sebagai pihak tergugat. Dalam perkara ini dipahami telah

²⁵ M Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang Undang No.7 Tahun 1989, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1989), hlm.231.

sempurna unsur penjatuhan perkara yang mengandung amar putusan berupa penjatuhan hukuman (condemnatoir).

Sebagai perkara yang benar-benar sengketa, maka perkara ini tampil sebagai perkara seutuhnya dan layak dijadikan induk perkara di mana digabungkan kepadanya beberapa perkara lain. Misalnya dengan menjadikan perkara turunannya sebagai anak perkara yang dapat digabungkan kepadanya, di antaranya; perkara penguasaan anak, pembayaran nafkah, dan pembagian harta bersama. Putusan terhadap anak perkara ini serentak akan dapat diambil bersamaan dengan perkara perceraian tersebut sebagai perkara induknya.

Berkenaan dengan tempat isteri untuk mengajukan gugatan, dalam hal ini ada keistimewaan di mana gugatan bukan dimajukan di tempat kediaman tergugat, tetapi di tempat kediaman penggugat. Dalam rangka pembelaan terhadap pihak isteri tersebut, di sini tidak berlaku asas umum "actor sequitur forum rei" yang mengatur tentang gugatan dimajukan di tempat kediaman tergugat, tetapi berlaku hal sebaliknya, yaitu gugatan dimajukan di tempat kediaman penggugat. Sehubungan dalam kesempatan ini yang tampil sebagai penggugat adalah isteri maka dia diringankan untuk hanya mengajukan perkara di tempat kediamannya sendiri. Hal ini sejalan dengan maksud pasal 73 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989, yang berbunyi;

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat.”

Dalam penjelasan pasal ini secara tegas dinyatakan keinginan untuk memberikan kemudahan bagi pihak isteri sebagai berikut;

“Berbeda dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 66 ayat (2), maka untuk melindungi pihak isteri, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat.”

Cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri dimaksud adalah bila isteri tetap bertempat tinggal di tempat kediaman bersama. Tempat tinggal yang ideal bagi isteri adalah tempat tinggal bersama suami isteri, bila dia konsisten bertempat tinggal di tempat ini maka dia cukup mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri (tempat tinggal bersama) ini. Sebaliknya bila isteri ternyata telah meninggalkan tempat ini dan dia sekarang ada di tempat lain maka tempat mengajukan perkara cerai gugat itu menjadi beralih menjadi tempat tinggal suami seperti prinsip umum gugatan pada umumnya. Jadi kemudahan ini hanya bisa didapat jika isteri tetap pada tempat tinggal bersama suami isteri tersebut.

Aturan lain dipahami sama dengan ketentuan yang diatur dalam pemeriksaan perkara cerai talak. Hal ini adalah sebagai berikut;

1). Pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh majelis hakim

Pemeriksaan perkara gugatan perceraian ini dilakukan oleh majelis hakim. Maksudnya adalah hakim yang memeriksa perkara ini terdiri dari tiga orang hakim, di mana seorang dari mereka bertindak sebagai ketua, dan yang lainnya menjadi anggota. Dengan tidak menutup kemungkinan adanya hakim tunggal sebagai pengecualian, tentu dalam hal yang sangat membutuhkan maka seorang hakim saja pun dapat melakukan pemeriksaan terhadap perkara. Pada prinsipnya setiap perkara akan diperiksa oleh hakim majelis, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian untuk memberlakukan hakim tunggal, misalnya untuk daerah-daerah terpencil, atau perkara-perkara yang sangat sederhana sehingga dipahami mubazzir bila dengan memberlakukan hakim majelis.

2). Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup

Dalam rangka menjaga kerahasiaan keluarga maka sidang gugat cerai ini dilaksanakan dalam sidang tertutup. Akan tetapi keengganan suami atau pun isteri untuk membuka persoalan secara terus terang bilamana persidangan tetap dengan memberlakukan asas umumnya, yaitu terbuka untuk

umum. Bisa saja kerahasiaan keluarga ini yang secara langsung menjadi pemicu terjadinya gugatan cerai ke Pengadilan. Dengan demikian hal ini harus diindahkan sebagai asas pengecualian dengan memberlakukan siding tertutup dalam pemeriksaan perkara mereka..

3). Pemeriksaan ditetapkan maksimal 30 hari dari tanggal pendaftaran gugatan

Dalam rangka memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan maka ditetapkan jangka waktu tenggang antara pendaftaran dengan pemanggilan adalah 30 hari. Ada target kerja yang harus diselesaikan sesuai aturan yang ada dengan mempertimbangkan kepentingan para pencari keadilan. Dalam hal ini para pihak dapat mengetahui haknya dalam tenggang waktu berapa lama akan dipanggil setelah memasukkan perkara itu ke Pengadilan, kecuali perkara itu mengalami kekurangan sehingga bisa diperbaharui kembali, dan berlakulah tenggang waktu baru kembali, demikian juga pihak Pengadilan memiliki aturan yang jelas tentang masa paling lama berkas itu boleh mengendap di Pengadilan. Dengan hal ini akan terlindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

4). Suami atau isteri hadir sendiri di Pengadilan atau wakilnya

Mengingat bangsa Indonesia pada umumnya masih sangat awam dengan ketentuan beraacara di Pengadilan maka hukum member kesempatan untuk tampilnya wakil sebagai pengacara dalam perkara cerai gugat ini. Kehadiran wakil (kuasa Khusus) di sini tidak mengurangi makna persidangan itu sama sekali, tetapi yang bersangkutan haruslah menceritakan secara lengkap kepada kuasanya tentang duduk perkara yang sebenarnya, demikian juga dengan poin-poin gugatan yang diinginkan untuk dikabulkan oleh hakim. Dengan demikian makna kehadiran wakil itu dapat mengemban aspirasi dari pemberi wakil sepenuhnya.

5). Upaya perdamaian dilaksanakan sepanjang proses pemeriksaan berlangsung

Dengan tidak mengurangi kesempatan hakim untuk dapat mengupayakan perdamaian atau menerima perdamaian maka hakim senantiasa telah menawarkan perdamaian terlebih dahulu (pada siding pertama). Perdamaian adalah prinsip yang paling utama dalam perkara perdata, terutama perceraian. Bila perdamaian ini tercapai maka ahakim akan menindak-lanjutinya dengan membuat akta perdamaian, dan menetapkan dalam vonis pengadilan, dengan konsekwensi tidak dapat disbanding dan tidak dapat diajukan kembali dalam perkara yang sama.

Hal ini seperti terlihat pada pasal-pasal berikut ini, yaitu;

Pasal 82;

(1) Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.

(2) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.

(3) Apabila kedua pihak bertempat kediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.

(4) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 83;

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.

Pasal 84;

(1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

(2) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

(3) Apabila perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkan perkawinan mereka di Indonesia.

(4) Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang

memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Pasal 85;

Kelalaian pengiriman salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 84, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

Pasal 86;

(1) Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.

BAB IV

MOTIVASI PERCERAIAN DI PA LUBUK PAKAM

PADA TAHUN 2008

A. Jumlah Perceraian

Jumlah perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2008 adalah 639 perkara, dan ini diklasifikasi kepada Gugat Cerai²⁶ sebanyak 460 perkara, dan Cerai Talak²⁷ sebanyak 179 perkara. Hal ini dapat dilihat pada table berikut ini.

TABEL PERCERAIAN

DI PA LUBUK PAKAM TAHUN 2008

NO	PERKARA	JUMLAH	PERSEN	KET.
1	CERAI GUGAT	460	71, 99	
2	CERAI TALAK	179	28, 01	
	TOTAL	639	100,00	

²⁶ Cerai gugat adalah perceraian yang datangnnya dari pihak isteri

²⁷ Cerai talak adalah perceraian yang datangnnya dari pihak suami.

Memperhatikan angka perceraian ini ternyata jumlah perceraian yang datangnya dari pihak isteri jauh lebih besar dibanding dengan perceraian yang datangnya dari pihak laki-laki (suami), yaitu 71,99 % dibanding dengan 28,01 %. Hal ini terlihat bahwa perceraian yang datangnya dari pihak perempuan itu hampir tiga kali lipat dari perceraian yang datangnya dari pihak laki-laki. Ini memperlihatkan bahwa pihak yang cenderung ceroboh untuk melakukan perceraian itu adalah perempuan.

Bila membanding dengan ajaran Islam yang mengatakan bahwa suami adalah pemegang hak talak secara mutlak, karena dialah ahlinya maka terlihat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa hal ini menjadi terbalik, yaitu pihak perempuan telah mendominasi pekerjaan itu. Hal ini sejalan dengan adanya kesempatan yang sama diberikan oleh Peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk bersikap proaktif dalam perceraian sepanjang hal itu sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa perempuan lebih semarak mempergunakan kesempatan ini dibanding dengan laki-laki.

Sikap proaktif perempuan dalam perceraian ini diperkirakan karena beberapa hal. Mungkin karena sikap emosional mereka, cepat bereaksi dalam menyikapi persoalan, dan bermudah-mudah dengan perceraian, atau yang lainnya. Yang pasti perempuan lebih cenderung kepada perceraian dibanding dengan laki-laki.

Berikut ini akan dikemukakan data perbandingan antara usia perkawinan dengan usia saat mereka melakukan perceraian. Hal ini dapat dilihat sebagai berikut;

TABEL USIA PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

DI PA LUBUK PAKAM TAHUN 2008

N O	USIA PERKAW	N I K A H		C E R A I	
		SUAMI	ISTERI	SUAMI	ISTERI
1	16 - 20	55	200	10	31
2	21 - 25	195	203	65	122
3	26 - 30	185	130	163	169
4	31 - 35	107	55	134	129
5	36 - 40	49	30	116	94
6	41 - 45	39	10	80	47
7	46 - 50	6	6	41	30
8	50 >	3	5	30	17
JUMLAH		639	639	639	639

Memperhatikan akan angka perceraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah perceraia terbesar adalah pada usia 26 sampai 30 tahun, kemudian usia 31 sampai 35 tahun, terus disusul oleh usia 36 sampai 40 tahun, terus lagi usia 21 sampai 25 tahun, lagi usia 41 sampai 45 tahun, lanjut dengan usia 46 sampai 50 tahun, lanjut lagi dengan usia di atas 50 tahun, dan terakhir usia 16 sampai 20 tahun.

Berangkat dari hal ini terpahami bahwa usia yang paling rawan untuk melakukan perceraian itu bagi pasangan suami isteri adalah pada masa mereka berusia antara 26 sampai 30 tahun. Usia ini dipahami sebagai usia rentan terhadap perceraian, karena masa ini masih berada dalam masa penjejukan, di mana mereka masih saja baru melangsungkan perkawinan (baru ada beberapa tahun), mereka masih berada dalam taraf adaptasi antara satu sama lain, dan mereka jelas belum matang dalam perkawinan ini. Di sini ada kelabilan, dan bagi mereka yang tidak bisa beradaptasi dengan baik maka kelabilan ini akan semakin menjadi boomerang bagi mereka, dan akhirnya cenderung terjadilah perceraian. Selanjutnya bagi mereka yang mampu beradaptasi dengan baik maka bertahanlah perkawinan ini, bahkan untuk masa yang akan datang sudah cenderung akan lebih aman lagi, karena kemapanan mereka sudah mulai tercapai. Dengan demikian usia seperti ini perlu menjadi perhatian dan kewaspadaan.

Berikutnya, usia dibawah 20 tahun adalah usia yang paling sedikit mengalami perceraian. Pertama, diperkirakan pada masa ini mereka sedang menikmati indahnya perkawinan, bahkan mereka tidak peduli segalanya, karena usia mereka memang masih belum cukup matang (21 tahun). Mereka cenderung sangat berbahagia karena masa puberitas mereka masih sedang berkemban. Kedua, angka perkawinan bagi mereka yang berusia di bawah 20 tahun ini memiliki jumlah

yang lebih kecil, karena memang usia ini belum diberikan kebebasan untuk melaksanakan perkawinan, tetapi harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang tua atau wali. Bahkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan jika usia mereka kurang dari 19 tahun untuk mempelai laki-laki, dan 16 tahun bagi mempelai perempuan. Kalaupun ada yang menikah pada usia ini, tetapi di atas kertas mereka akan berusaha supaya usia mereka telah mencapai 21 tahun sehubungan dengan sulitnya proses untuk mendapatkan izin orang tua atau wali ini, dan dispensasi dari Pengadilan ini. Hal inilah yang mengakibatkan sedikitnya perceraian tersebut.

TABEL LAMA PERKAWINAN

DI PA LUBUK PAKAN TAHUN 2008

NO	LAMA PERKAWINAN	PERKARA	PERSENTASE
1	0 - 1 Tahun	71	11,12 %
2	2 - 3 Tahun	135	21,13 %
3	4 - 5 Tahun	93	14,56 %
4	6 - 7 Tahun	95	14,87 %
5	8 - 9 Tahun	70	10,96 %
6	10 - 11 Tahun	49	7,66 %
7	12 - 13 Tahun	29	4,53 %
8	14 - 15 Tahun	34	5,32 %

9	16 - 17 Tahun	33	5,16 %
10	18 - 19 Tahun	17	2,66 %
11	20 >	13	2,03 %
JUMLAH		639	100 %

Ditinjau dari segi lamanya perkawinan itu baru terjadi perceraian maka dapat disimpulkan bahwa perceraian yang terjadi dengan lama perkawinan 2 sampai 3 tahun adalah jumlah yang paling banyak, yaitu mencapai 135 orang dengan persentase sebesar 21,13 %. Sedang yang paling kecil adalah lama perkawinan 20 tahun ke atas.

Hal ini ternyata sejalan dengan analisis di atas, di mana ada masa adaptasi. Pada saat mereka tidak berhasil dalam masa adaptasi ini maka maka terjadilah kegoncangan dalam perkawinan mereka, dan dimungkinkan untuk bubarnya perkawinan itu, sebaliknya bila mereka mampu beradaptasi dengan baik maka bertahanlah perkawinan itu. Masa adaptasi ini terlihat adalah dalam dua tahun pertama perkawinan itu dilangsungkan, sedang selanjutnya dipahami bahwa mereka cenderung sudah saling sama-sama memahami, dan mengerti, bahkan mampu memberikan terapi terhadap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi.

Sebaliknya, masa paling kecil perceraian adalah usia perkawinan 20 tahun ke atas. Ini memperlihatkan bahwa kemapanan dalam perkawinan itu telah tercapai, di mana

masing-masing suami dan isteri itu telah sangat memahami antara satu sama lain. Hal ini akan menimbulkan pengertian, bahkan anti tesa terhadap setiap polemik yang akan mungkin terjadi. Pada sisi lain kesempurnaan kedewasaan masing-masing suami isteri ini telah sempurna, dan ini menjadi modal yang sangat berharga bagi mereka untuk lebih tenang dan mampu mengatasi persoalan mereka. Hal ini jelas berkilas-balik terhadap kecilnya perceraian dalam usia tua ini.

B. Motivasi Perceraian

Secara umum motivasi perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakan ada empat macam, yaitu;

3. Tidak ada tanggung jawab
4. Tidak ada keharmonisan
5. Gangguan pihak ketiga
6. Ekonomi

Mungkin ada banyak motif dari perceraian, tetapi Pihak Pengadilan Agama Lubuk Pakan sengaja memformat sendiri dan melakukan pengelompokan sendiri, dan akhirnya membuat motif perceraian itu kepada empat hal seperti dikemukakan di atas.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang intensitas, dan perbandingan antara satu sama lain dari keempat motif ini dapat dilihat pada tabel berikut ini sebagai berikut;

TABEL MOTIF PERCERAIAN
DI PA LUBUK PAKAN PADA TAHUN 2008

NO	MOTIF PERCERAIAN	JUMLAH	PERSEN
1	Tidak ada tanggung jawab	420	64,62 %
2	Tidak ada keharmonisan	100	14,64 %
3	Gangguan pihak ketiga	60	9,38 %
4	Ekonomi	79	11,36 %
TOTAL		639	100,00 %

Memperhatikan akan data tersebut ternyata motivasi perceraian yang paling dominan adalah "Tidak adanya tanggung jawab" baik oleh suami, maupun isteri. Hal ini terbukti dengan adanya 420 perkara perceraian, setara dengan 64,62 % dari seluruh perkara yang ada. Pengadilan mengabulkan perceraian ini karena telah terbukti terjadi ketidak-rukunan akibat adanya pihak yang melalaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga tersebut.

Tidak ada tanggung jawab ini mengandung pengertian yang cukup luas, di mana masing-masing pihak sudah tidak peduli lagi dengan tugas dan tanggung-jawabnya, dia tidak memainkan perannya sebagai suami dan isteri yang sesungguhnya. Suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memimpin keluarga, melindungi isteri, anak dan dan seluruh keluarga, member rasa aman bagi

mereka, dan bertanggung-jawab terhadap nafkah keluarga, meskipun isteri turut membantu, dan dapat melakukannya. Demikian juga dengan isteri sebagai ibu rumah tangga bertugas untuk mengurus rumah tangga, setia dan berbakti kepada suami, mengurus anak-anak, dan yang lainnya. Pengabaian akan hal ini sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan untuk hal ini dikatakan dengan perceraian yang terjadi karena tidak adanya tanggung jawab, baik oleh pihak suami, maupun oleh pihak isteri.

Faktor ekonomi sebagai motivasi perceraian terlihat sebagai hal yang terkecil dua setelah gangguan pihak ketiga. Hal ini terlihat hanya ada 79 perkara saja, dan ini setara dengan 11,36 % dari keseluruhan perkara perceraian yang ada di Lubuk Pakam. Masyarakat Lubuk Pakam diperkirakan sangat menyadari keberadaan kondisi ekonomi keluarganya yang terbilang sederhana, atau memang kondisi ekonomi mereka cenderung baik.

Ternyata krisis ekonomi yang melanda bangsa ini, bahkan krisis ekonomi global yang sekarang ini sedang berkesinambungan ternyata tidak berdampak serius terhadap perceraian di PA Lubuk Pakam. Hal ini membuktikan bahwa ketangguhan rumah tangga dari terpaan kemiskinan dan kesulitan ekonomi terlihat cukup baik, dibanding dengan sikap mental mereka untuk siap menjadi seorang suami atau isteri yang benar-benar menjalankan fungsinya.

Sementara gangguan pihak ketiga adalah menempati angka terkecil dari jumlah perceraian yang ada. Hanya ada 60 perkara perceraian dengan motif ini, dan ini setara dengan 9,38 % dari jumlah seluruh perkara perceraian yang ada. Hal ini mengindikasikan bahwa pasangan suami isteri di daerah wilayah hukum PA Lubuk Pakam adalah pasangan yang lumayan jujur dan setia terhadap pasangannya ,masing-masing. Meskipun ada ada gangguan dari pihak ketiga tetapi jika pasangan suami isteri itu memiliki kesiapan yang memadai tentu hal itu tidak akan berpengaruh terhadap mereka, atau pada kemungkinan yang lain bahwa di sana telah ada masyarakat yang memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak mau menggoda atau mengganggu suami atau isteri orang lain. Dengan hal ini jadilah angka perceraian terkecil dengan motif ini.

C. Contoh Motif Perceraian

1. Karena Tidak Ada Tanggung Jawab

Perkara ini adalah perkara gugat cerai, yang dilakoni oleh;

- a. SUMIYATI BINTI DAHLAN (ISTERI), umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Dusun V Desa Jati Rejo, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang yang bertindak sebagai PENGGUGAT dalam perkara ini.
- b. RACHMAN BIN SASILO (SUAMI), UMUR 46 TAHUN, AGAMA Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh

bangunan, tempat tinggal d/a rumah ibu Tampubolon, Dusun V Desa Jati Rejo, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, dalam perkara ini tampil sebagai TERGUGAT dari isterinya sendiri.

Pada tanggal 15 Mei 2008, Pengadilan Agama Lubuk Pakam ternyata telah memutuskan perkara, mengabulkan permohonan isteri dalam perkara gugat cerai terhadap suaminya sebagai tergugat dengan motif "TIDAK ADA TANGGUNG JAWAB". Suami tidak ada tanggung jawab terhadap istrinya karena dia telah melanggar taklik talak, dengan gambaran sebagai berikut;

Dalam penjelasan Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa perkara ini mengatakan bahwa sesaat setelah akad nikah suami benar telah mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi:

Sewaktu-waktu saya ... ;

- 1). Meninggalkan isteri saya itu dua tahun berturut-turut
- 2). Atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
- 3). Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu
- 4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau Petugas yang diberikan hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan, serta diterima oleh Pengadilan atau Petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. ...

Ternyata bahwa suami tersebut sebagai tergugat benar terbukti telah lari dari tanggung jawab dengan cara melanggar taklik talak yang pernah diucapkannya sendiri dalam tiga poin, yaitu poin 1, 2, dan 4. Yaitu meninggalkan isterinya selama tujuh tahun, tidak memberikan nafkah selama tujuh tahun, dan tidak memperdulikannya selama tujuh tahun²⁸

Sumiyati menjelaskan bahwa dia benar-benar telah sangat menderita dengan perlakuan suaminya kepadanya, Suami saya itu sudah tidak ada lagi tanggung jawabnya kepada saya dan keluarganya, karena Dia telah meninggalkan saya dan keluarganya selama 7 (tujuh) tahun, dan ini terjadi setelah diawali dengan pertengkaran kami sebagai suami isteri. Awal pertengkaran terjadi karena dia berpacaran dengan wanita lain, lantas saya marah, lalu sejak saat ini dia pergi

²⁸ Informasi dari majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, yang terdiri dari; Dra.Lailan Azizah Nst., SH.,MH. Sebagai Hakim Ketua, dan Drs. M.Jhon Afrijal, SH.,MH., dan Robinhot Kaloko, SH., MH. sebagai Hakim Anggota, serta Helmiyah Hasibuan, S.Ag. sebagai Panitera Penganti, lewat Keputusan Perkara Nomor: 256/Pdt.G/2008/PA-Lpk. Tanggal 15 Mei 2008.

untuk selamanya, dia tidak pernah pulang lagi, sekaligus saya sudah sudah pisah rumah dengannya, akhirnya saya pun terpaksa mempertanggung-jawabkan diri saya sendiri dan anak-anak kami. Ternyata memang rumah tangga kami benar-benar tidak seperti yang dibayangkan dulu lagi.²⁹

Di atas tuduhan Sumiyati sebagai isteri, Rachman sebagai suami benar-benar tidak bisa mengelak karena hal ini juga dikukuhkan oleh Mahmud Soleh bin Mubarak, dan Sufrianto bin Sulaiman sebagai saksi-saksi, sehubungan dengan status mereka sebagai tetangga, bahkan pihak yang ikut mempersaksikan perkawinan mereka, dan mendengar terhadap ikrar taklik talak yang diucapkan oleh Rachman dulu pada saat akad nikah.

Sepeninggal suami, Sumiyati sebagai ibu rumah tangga terpaksa hidup mandiri untuk mencari nafkah dan membiayai tiga orang anaknya. Untuk hal ini Dia telah bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan cara menyuci pakaian di rumah orang lain. Akhirnya setelah tujuh tahun dia berjuang, dan menanti suaminya yang tidak pernah pulang maka Dia pun ingin mempertegas statusnya, lalu menggugat cerai suaminya ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan ternyata dikabulkan.

²⁹ Wasil wawancara dengan Yati (mantan isteri) di rumahnya sendiri Desa Jati Rejo Pagar Merbo, pada tanggal 25 Juli 2009

Berdasarkan pengakuan Rahman (suami), benar bahwa rumah tangga mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena isterinya tidak dapat menerima kenyataan hidup bahwa dia adalah orang yang susah, dia tidak sabar menerima apa adanya, semua orang ingin hidupnya lumayan tetapi kenyataan kan bercerita lain, hal seperti ini hendaknya diperjuangkan sama-sama. Hal ini memperlihatkan bahwa kebersamaan yang tangguh tidak ada di antara kami, rumah tangga kami sudah tidak seperti yang diharapkan dulu, yaitu adanya keinginan untuk tetap bersama baik di waktu susah maupun di waktu senang. Berarti inilah jalan terbaik bagi kami, kami memiliki jalan sendiri-sendiri, dan masing-masing, akunya pasrah.³⁰

2. Karena Tidak Ada Keharmonisan

Perkara ini juga adalah perkara Gugat Cerai, antara;

- a. SUSAN FITRI YANTI BINTI M. BASYAR (isteri), umur, 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Dusun VIII, Desa Bangun Rejo, Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang, yang bertindak sebagai PENGGUGAT dalam perkara ini.

³⁰ Hasil wawancara dengan Rahmat (mantan suami) di tempat kediamannya sendiri Desa Jati Rejo Pagar Merbo pada tanggal 25 Juli 2009

- b. KIKI LESMANA BIN SABARUDDIN (suami), umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan tidak tetap (mocok-mocok), tempat tinggal Dusun VIII Gg. Kasmir, Desa Bangun Rejo, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang, di sini dinyatakan sebagai TERGUGAT.

Pada tanggal 20 Pebruari 2008 Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah menyelesaikan perkara Gugat Cerai ini, di mana isteri tampil sebagai penggugat terhadap suaminya sebagai tergugat dan memutuskan perceraian di antara mereka, dengan alasan karena rumah tangga mereka tidak harmonis.

Berdasarkan pengakuan Susi (isteri), mereka hanya pernah hidup harmonis selama satu bulan dalam perkawinan mereka. Tanggal 26 Juni 2004 saat mereka menikah sampai awal bulan juli 2004 mereka hidup rukun, tapi sejak bulan Agustus 2004 sampai sekarang (saat perkara mereka disidangkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tahun 2008) sudah sering terjadi pertengkaran, rumah tangga mereka tidak harmonis lagi. Dengan demikian isteri menjadikan hal ini sebagai alasan untuk melangsungkan perceraian.

Menurut pengakuan isteri, ketidak-harmonisan di antara mereka terjadi karena;

- 1). Suami sering mabuk-mabukan, dan berjudi
- 2). Suami kurang memberi nafkah (belanja) keluarga

3). Suami sering berkata kasar kepadanya

4). Puncaknya pada bulan Januari 2008, suami tidak percaya kalau isteri benar ada menginap di rumah adiknya yang baru melahirkan.

Susan mengaku bahwa mereka sering bertengkar, bahkan masalah yang kecil pun demikian, dan ini menjadi pertanda tentang tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga mereka. Dia menambahkan bahwa rumah tangga mereka tidak pernah sunyi dari keributan, pertengkaran rata-rata terjadi sekali seminggu. Karenanya, dia tidak tahan lagi, dan tidak sabar dengan rumah tangga seperti ini, dan dia ingin melepaskan diri dari rumah tangga semacam ini, dengan cara mengajukan perceraian.³¹

Upaya perdamaian sudah sering dilakukan dan hasilnya hanya untuk memperlambat terjadinya perceraian, Upaya perdamaian sering tidak menyelesaikan masalah sampai ke akar persoalan, tetapi dengan niat baik dan sikap berlapang dada dari kami biasanya kami dapat menerima perdamaian yang dilakukan, dan hal ini biasanya sudah mampu meredam keributan yang terjadi, meskipun sifatnya sesaat suami isteri kembali akur. Dengan hal seperti ini maka rumah tangga dapat dipertahankan sampai empat tahun.

³¹ Informasi ini diperoleh dari Sisi sebagai mantan isteri di tempat kediamannya sendiri pada bulan tanggal 22 Juli 2008

Isteri mengatakan bahwa badai pertengkaran yang pada akhirnya menghanyutkan rumah tangga ini datang pada bulan Januari 2008. Saat itu saya ingin menghibur, dan bersenda-gurau dengan adik saya yang sedang melahirkan, sehingga saya menginap di sana, tetapi suami saya menuduh hal yang tidak baik kepada saya dengan menyanggah bahwa saya tidak benar menginap di rumah adik, lalu hal ini pun menyulut pertengkaran yang tidak dapat diselesaikan lagi, dan saya pun tidak pulang ke rumah lagi, tetapi pulang ke rumah orang tua sampai akhirnya terjadi perceraian ini lewat Pengadilan Agama. Dengan demikian hancurlah rumah tangga yang dibangun empat tahun silam.

Rahimah, ibu dari Susan (Penggugat) juga turut dipanggil sebagai saksi, dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Susan itu adalah benar, dan saya sendiri pun sudah pernah tampil sebagai juru damai bagi mereka, karena mereka pernah tinggal di rumah saya. Hal yang sering menjadi pemicu pertengkaraan adalah menyangkut uang belanja yang kurang atau tidak diberikan. Selama ini pertengkaran itu masih tetap dapat diselesaikan, tetapi untuk yang terakhir ini, saya sendiri pun sudah tidak mampu lagi mendamaikan mereka, dan saya pun terpaksa pasrah tentang mereka. Akhirnya perceraian pun tidak dapat dihindari dari mereka.

Lisnawati yang juga sebagai saksi mengatakan, saya adalah tetangga mereka, jadi saya adalah orang yang banyak tahu dengan mereka. Saya ada beberapa kali secara langsung

menyaksikan mereka terlibat dalam pertengkaran, terutama saat mereka tinggal di tempat mertua perempuan. Di antara pemicunya adalah keadaan Kiki yang tidak memiliki pekerjaan tetap, jadi dia terkadang bekerja dan terkadang tidak bekerja, karenanya dia tidak tahu pasti kapan ada uangnya, dan hal inilah yang membuat Kiki tidak jelas memberikan uang belanja keluarganya, sekaligus inilah yang sering menjadi pemicu pertengkaran di antara mereka, dan akhirnya mengantarkan mereka kepada perceraian.

Semua itu tidak dibantah oleh Kiki sebagai tergugat karena dia sendiri tidak pernah hadir di Pengadilan. Pengadilan ingin mengklarifikasi tuduhan Susan terhadap Kiki tetapi meskipun Kiki sudah dipanggil secara layak, namun dia tetap tidak pernah mau hadir di Pengadilan, akhirnya hakim mengabulkan gugatan Susan dalam putusan Verstek. Di duga apa yang dituduhkan Susan itu terhadap Kiki adalah benar, dan Kiki sendiripun sudah bosan dengan pertengkaran itu, dan sudah lebih ingin untuk bercerai saja dengan isterinya, maka dia tidak hadir di Pengadilan, dan Pengadilan pun menceraikan mereka di atas ketidak-hadiran suami walau sekali pun.

Berdasarkan pengakuan mantan suami (Kiki), memang rumah tangga mereka tidak harmonis. Apa yang bibayangkan dulu sebelum menikah, ternyata jauh dari kenyataan, dia (mantan isteri) saya pahami sebagai orang yang penuh pengertian, ternyata tidak sama sekali, dia tidak dapat di atur,

dia tidak menghargai saya, dan dia pergi sendiri ke mana maunya, misalnya ke rumah adiknya, dan akhirnya tinggal di rumah orang tuanya. Karenanya biarkanlah semua itu berlalu.³²

³² Pengakuan Koko (mantan suami) di tempat kemiamannya sendiri tanjung Morawa, pada tanggal 20 Juli 2009

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai salah satu lembaga yudikatif di tingkat II Kabupaten Deli Serdang ternyata telah menerima perkara perceraian yang relative cukup banyak pada tahun 2008. Ada sebanyak 721 perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama tersebut. Dari jumlah itu telah diselesaikan dan dikabulkan sebanyak 639 perkara, ditolak 6 perkara, digugurkan 27 perkara, dicoret 5 perkara, dan dicabut/ damai sebanyak 44 perkara.

Khusus untuk perkara yang dikabulkan tersebut sebanyak 639 perkara maka dari jumlah tersebut tercatat sebagai perkara permohonan cerai talak sebanyak 179 perkara, dan sisanya sebanyak 460 perkara sebagai permohonan Gugat Cerai, yang berarti bahwa perceraian yang datangnya dari pihak isteri adalah lebih banyak dari pada perceraian yang datangnya dari pihak suami dengan perbandingan hampir tiga kali lipat.

Setelah ditotal, kemudian dikalsifikasi semua perkara perceraian tersebut maka ada 4 (empat) motif perceraian yang terjadi di PA Lubuk Pakam pada tahun 2008 tersebut.

1. Tidak ada tanggung jawab sebanyak 420 perkara (64,62 %) sekaligus sebagai penyebab terbesar.

2. Tidak ada keharmonisan sebanyak 100 Perkara (14,64 %), dan ini sebagai penyebab perceraian kedua terbesar.
3. Ekonomi sebanyak 79 perkara (11,36 %), hal ini sekaligus menjadi penyebab perceraian terkecil kedua setelah motif gangguan pihak ketiga.
4. Gangguan pihak ketiga sebanyak 60 perkara (9,38 %), sekaligus sebagai perkara perceraian dengan motivasi terkecil.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada calon mempelai supaya mempersiapkan diri sebaik mungkin dalam memasuki jenjang perkawinan, terutama dari aspek tanggung-jawab dalam rumah tangga, pihak laki-laki bertanggung-jawab sebagai suami dengan tugas dan tanggung jawab yang ada di dalamnya, demikian pula dengan perempuan bertanggung-jawab sebagai isteri dengan segala tugas dan tanggung jawab yang ada padanya, sehingga dengan hal ini akan lebih terantisipasi terjadinya perceraian terutama dengan motif tidak adanya tanggung-jawab.
2. Kepada pasangan suami isteri disarankan supaya berusaha sekuat tenaga untuk tampil sebagai suami atau isteri seutuhnya yang siap memikul yang siap memikul segenap tugas dan tanggung jawab yang ada di dalamnya.

3. Kepada pihak Pemerintah supaya turut berperan serta untuk melakukan pembinaan keluarga sakinah, mulai dari sedini mungkin, misalnya sejak usia sekolah, calon mempelai, bahkan pasangan yang sudah menikah. Dengan hal ini diharapkan akan terjadi peningkatan kesadaran tentang peningkatan kualitas keluarga sakinah tersebut.
4. Kepada pihak Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Lubuk Pakam supaya meningkatkan kualitas dan kuantitas upaya perdamaian, dan memberikan nasihat terhadap pihak berperkara, dengan harapan bahwa mereka akan mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, dan menyadari perannya kembali sebagai suami dan isteri yang baik.

DAFTAR BACAAN

- Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, dalam CD Kutub al-Tis`ah
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi kritis Perkembangan Hukum Isalam dan Fikih*, UU No.1/1974 sampai KHI, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2004)
- Asy-Syurazi, *Al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi`i*, Juz.2, (Damsyik : Dar al-Fikr li al-Thaba`ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi`, t.t.)
- Bukhari, *Shahih Bukahari*, dalam CD Kutub al-Tis`ah
- Departemen Agama RI., *Pembaharuan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Departemen Agama RI., 2004)
- _____, *Suntingan Fiqh Bidang Perkawinan*, (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI., 1998/1999)
- _____, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Dirbinbapera Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI., 1992/ 1993)

- Abdurrahman al-jaziri, *Kitab al-Fiqh ala mazahib al-`Arba`ah*, Juz.4, (Damsyik : Dar al-Fikr li al-Thaba`ah wa al-Tauzi`, t.t.) □
- Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Jambatan, Cet. Ke-3, 1985)
- Heri Munandar Lubis, *Itsbat Nikah Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis di Pengadilan Agama Medan (Skripsi)*, (Medan : 2005 M./ 1426 H.)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar maju, 1990)
- Ibn Kasir al-Kursy, *Tafsiran ibn Kasir*, Juz.1, (Beirut - Libanon : Dar al-Fikri li at-Thaba`ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi`, 1981 M./ 1401 H.)
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, dalam Kutub al-Tis`ah
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz.9, (Riyad : Dar `Alam al-Kutub li al-Thaba`ah wa al-Nasyar wa al-Tauzi`, t.t.)
- Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Juz.2, (Indonesia : Dar Ihyai al-Kutub al-`Arabiyah, t.t.)
- Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad al-Mahalli, *Hasyiyatani*, Juz.3, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

- M. Yahya harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975*, (Medan: CV Zahir Tarading Co, 1975)
- Mahyuddin bin Syarif al-Nawawi, *Majmu` Syarah al-Muhazzab*, Juz. 17, (Jeddah : Maktabah al-Irsyad, t.t.)
- Malik ibn Anas, *Al-Muwattha*, CD Kutub al-Tis`ah
- Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subulussalam*, Juz.3, (Bandung: t.t.)
- Muslim ibn Hajjaj, *Shahih Muslim*, dalam CD Kutub al-Tis`ah
- Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan : IAIN Press, 1995)
- Pengadilan Agama Medan, *Buku Dokumen Perkara Pengadilan Agama Medan tahun 2008*
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz.2, (Kuwait : Dar al-Bayan, 1388 H.)
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz.7, Cet. Ke-3, (Damsik : Dar al-Fikr, 1989 M./ 1409 H.)

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM KELAS I-B

Jl. Mahoni No. 3 Komplek Kantor Bupati Deli Serdang Telp. (061) 7952010

Fax. (061) 7956255, Website: pa-lubukpakam.net

Email: pa-lubukpakam@pta-medan.go.id

LUBUK PAKAM (20514)

SURAT KETERANGAN

N0 : W2-A10/777/UM.02.07/VII/2009

Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : H.PAGAR

(Peneliti pada Lembaga Penelitian IAIN Sumatera Utara)

Sesuai dengan surat dari Ketua Lembaga Penelitian IAIN – SU Nomor : In.07/G/TL.01/57/2009 tanggal 29 Juni 2009 Tentang Izin Pengumpulan Data Penelitian dengan judul : **“MOTIF PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM : Studi Terhadap Perkara tahun 2008”**. dan dinyatakan telah selesai mengambil data yang diperlukan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lubuk Pakam 17 Juli 2009

Panitera,


PARLUHUTAN, SH